

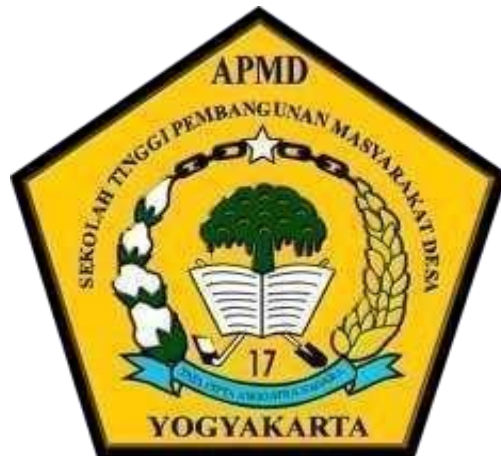
SKRIPSI

RELASI KUASA PEMERINTAH KABUPATEN

PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

WISATA PEMANDIAN AIR PANAS

(Studi di Desa Mengeruda oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada)



Disusun Oleh:

MARGARETHA HERLINCHE LOY LEI

21520139

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

SKRIPSI
RELASI KUASA PEMERINTAH KABUPATEN
PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
WISATA PEMANDIAN AIR PANAS
(Studi di Desa Mengeruda oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada)



Disusun Oleh:
MARGARETHA HERLINCHE LOY LEI
21520139

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025



**RELASI KUASA PEMERINTAH KABUPATEN
PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
WISATA PEMANDIAN AIR PANAS**

(Studi di Desa Mengeruda oleh Dinasi Pariwisata Kabupaten Ngada)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

Margaretha Herlinche Loy Lei

21520139

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 16 Mei 2025
Waktu : 09:00-10:00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD”

TIM PENGUJI

1. Analius Giawa, S, IP, M. Si

Ketua Penguji/Pembimbing

2. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat

Penguji Samping 1

3. Drs. R. Y. Gatot Raditya, M. Si

Penguji Samping 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Margaretha Herlinche Loy Lei
Nim : 21520139
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Relasi Kuasa Antara Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda (*Studi di Desa Mengeruda oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngadu*) adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip merupakan dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya

Yogyakarta, 1 Mei 2025

Yang Menyatakan



Margaretha Herlinche Loy Lei
21520139

MOTTO

Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus

**“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi tuhan menolongku. Tuhan itu
kekuatann dan mazmurku; ia telah menjadi keselamatanku”**

(Mazmur 118:13-14)

**“Aku tau, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada
rencana-Mu yang gagal”**

(Ayub 42:2)

“Jangan takut, percaya saja”

(Markus 5:36)

**Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dn bertekunlah
dalam doa”**

(Roma 12:12)

“Karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang”

(Amsal 23:18)

**“Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan**

Kepadamu”

(Markus 11:24)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa terima kasih, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan yang senantiasa memberikan berkat, kesehatan, rezeki, serta penyertaan dan perlindungan-Nya kepada saya selama berada di Yogyakarta.
2. Kepada dua sosok paling berarti dan sangat luar biasa dalam hidup saya, Bapak Fransiskus Lei Meo dan Ibu Yunia Tay, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya. Terima kasih atas setiap doa yang tulus, setiap pengorbanan, serta dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada saya dengan sangat tulus. Segala pencapaian yang saya raih hingga saat ini tidak terlepas dari perjuangan, kerja keras, dan cinta yang kalian curahkan dengan sepenuh hati. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang tak terhingga kepada Bapak dan Mama, sebagai balasan atas ketulusan dan cinta yang telah kalian berikan kepada saya.
3. Kepada Kaka dan adik kandung saya Aleksander Meo Lei dan Natalia Nindia Moi Lei yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang yang tulus kepada saya.. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta sumber motivasi di setiap perjalanan hidup saya. Kehadiran kalian memberikan warna dan kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan berkat dalam setiap langkah hidup kalian.

4. Kepada keluarga besar saya yang ada di Soa dan di Sumba, terima kasih atas setiap nasihat, dukungan, dan doa yang telah kalian berikan kepada saya sampe saat ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat bagi kalian semua.
5. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Anggy Rere, Ertyn Wua, Ina Uwa, dan Afi Da'a, yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah menjadi sahabat yang baik yang tidak bosanya menasehati dan menyemangati saya selama ini. Terimakasih sudah bersedia saat kapanpun dibutuhkan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang berlimpah dalam hidup kalian.
6. Kepada Keluarga Besar Soa Yogyakarta (KBSY) yang menjadi tempat dimana saya belajar untuk berorganisasi.
7. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga sejauh ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Berkah dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemanadian Air Panas (*Studi di Desa Mengeruda oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada*). Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,”.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Untuk Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Drs. R. Y. Gatot Raditya, M.Si selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan beberapa masukan, kritik dan

saran yang sangat membangun selama proses ujian skripsi ini. Segalah arahan yang diberikan telah membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Kepada Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Segenap pihak Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupten Ngada, Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Memgeruda yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih banyak telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Untuk teman-teman seperjuangan saya dari maba di bangku perkuliahan Fidi, Anggy, Agnes, Selo, Ranti, Kamelia, Zefora, terimakasih untuk kebersamaan, dukungan dan semangat selama ini, Semoga keberhasilan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita ke depan.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah dengan caranya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTARGAMBAR.....	xiii
INTISARI	xv
SUMARY	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Peneliti.....	6
a. Manfaat secara Teoritis.....	6
b. Manfaat secara Praktis	6

F. <i>Literatur Review</i>	6
G. Kerangka Konseptual	14
1. Relasi Kuasa.....	14
2. Pengertian Pemerintah.....	17
a. Pemerintah Daerah	20
b. Pemerintah Desa	24
3. Masyarakat.....	25
4. Pengelolaan.....	27
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Unit Analisis	28
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Teknik Analisis Data	32
 BAB II PROFIL DESA MENERUDA DAN DESKRIPSI DESTINASI	
WISATA PAMANDIAN AIR PANAS MENERUDA.....	35
A. Profil Desa Mengeruda.....	35
1. Sejarah Desa Mengeruda.....	35
2. Kondisi Geografis	36
a. Batas Wilayah Desa	36
b. Luas Wilayah Desa.....	37

c. Pembagian Wilayah Desa.....	37
3. Kondisi Demografis.....	38
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencharian.....	40
4. Prasarana Desa Mengeruda.....	42
a. Prasarana Pendidikan.....	42
b. Prasarana Kesehatan.....	43
c. Prasarana Keagamaan	43
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	44
6. Kelembagaan dan Struktur Organisasi	45
B. Deskripsi Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda.....	48
1. Sejarah Destinasi WisataPemandian Air Panas	48
2. Letak Georafis Destinasi Wisata	49
3. Petugas Destinasi Wisata	50
4. Daya Tarik Destinasi Wisata	50
5. Fasilitas Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	57
6. Aksebilitas dan Jam Oprerasional	64
BAB III RELASI KUASA PEMERINTAH KABUPATEN, PEMERINTA	
DESA DAN MASYARAKAT DALAM PEN GELOLAN WISATA	
PEMANDIAN AIR PANAS.....	66
A. Relasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Sebagai	
Penyelenggara Pemerintah.....	67

B. Peran Pemerintah sebagai Regulating dan Proteksi bagi Masyarakat Desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Provinsi NTT	75
C. Hubungan Timbal Balik antara Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa dan Masyarakat yang Terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Air Panas Mengeruda	82
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
 LAMPIRAN	
Pedoman Wawancara	
Dokumentasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informasi Penelitian.....	29
Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Mengeruda	36
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Pendidikan	42
Tabel 2.3 Jumlah Sarana Kesehatan.....	43
Tabel 2.4 Jumlah Sarana Ibadah	43
Tabel 2.5 Nama Perangkat Desa Mengeruda	47
Tabel 2.6 Petugas yang Bekerja di Destinasi Wisata.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Presentase KK per Dusun.....	37
Gambar 2.2 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38
Gambar 2.3 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	40
Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mengeruda	46
Gambar 2.5 Destinasi Wisata Pemandian Air Panas	48
Gambar 2.6 Sumber Mata Air Alami	52
Gambar 2.7 Kolam Alami dengan Variasi Suhu	54
Gambar 2.8 Pemandangan Alam yang Masi Asri	56
Gambar 2.9 Akses Jalan	58
Gambar 2.10 Tempat Parkir.....	59
Gambar 2.11 Loker Karcis	60
Gambar 2.12 Rumah Payung	61
Gambar 2.13 Gazebo Besar.....	62
Gambar 2.14 Kamar Mandi.....	63
Gambar 2.15 Lampu Penerang Jalan.....	64

INTISARI

Penelitian ini mengkaji dinamika relasi kuasa dalam pengelolaan destinasi wisata Pemandian Air Panas Mengeruda di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Meskipun kawasan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterlibatan aktor lokal. Salah satu permasalahan utama adalah tidak dilibatkannya pemerintah desa serta minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut. Seluruh kewenangan pengelolaan berada di tangan pemerintah kabupaten, sementara masyarakat desa hanya diberikan izin untuk membuka usaha di luar kawasan wisata. Selain itu, rekrutmen tenaga kerja untuk operasional wisata dilakukan secara langsung oleh pemerintah kabupaten, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat lokal yang mendapat kesempatan untuk terlibat secara langsung. Padahal, objek wisata ini merupakan bagian dari potensi desa yang seharusnya dapat dikelola secara lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan penguatan kapasitas lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pariwisata, pegawai Dinas Pariwisata, kepala desa, sekretaris desa, masyarakat desa, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Mengeruda sebagai penyelenggara pemerintahan belum terjalin secara harmonis. Pengelolaan destinasi wisata ini masih cenderung didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, sementara Pemerintah Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan wisata ini. Kedua, Peran Pemerintah Kabupaten sebagai regulator dan pelindung masyarakat Desa Mengeruda belum dijalankan secara proporsional. Pemerintah Kabupaten lebih menonjol dalam fungsi pengendalian, sementara aspek perlindungan dan pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian. Regulasi yang diberlakukan lebih menekankan kewenangan sepihak tanpa membuka ruang partisipasi yang adil bagi pemerintah desa dan masyarakat lokal. Ketiga, hubungan timbal balik antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata ini belum optimal. Minimnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga pihak masih bersifat satu arah. Pemerintah Kabupaten menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam pengelolaan wisata, sedangkan masyarakat dan desa hanya berperan sebagai pelengkap pasif tanpa mendapatkan dukungan maupun manfaat yang sepadan.

Kata kunci: Relasi, Pemerintah, Destinasi Wisata, Masyarakat

SUMMARY

This study examines the dynamics of power relations in the management of the Mengeruda Hot Springs tourist destination in Mengeruda Village, Soa District, Ngada Regency, East Nusa Tenggara. Although this area has great economic potential, its management still faces various challenges, especially related to the involvement of local actors. One of the main problems is the non-involvement of the village government and the minimal participation of the community in the management of the tourism. All management authority lies in the hands of the district government, while village communities are only given permission to open businesses outside the tourism area. In addition, recruitment of workers for tourism operations is carried out directly by the district government, so that only a small part of the local community gets the opportunity to be directly involved. In fact, this tourist attraction is part of the village's potential that should be managed more inclusively, by involving the community and village government as part of efforts to empower and strengthen local capacity.

This study uses a qualitative explorative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study include the Head of the Tourism Office, employees of the Tourism Office, village heads, village secretaries, village communities, and community leaders. Data analysis was carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that First, the relationship between the Regency Government and the Mengeruda Village Government as the organizers of government has not been harmonious. The management of this tourist destination still tends to be dominated by the Ngada Regency Government, while the Village Government is not involved in the management of this tourism. Second, the role of the Regency Government as a regulator and protector of the Mengeruda Village community has not been carried out proportionally. The Regency Government is more prominent in its control function, while aspects of community protection and empowerment receive less attention. The regulations that are enforced emphasize unilateral authority without opening up fair participation space for the village government and local community. Third, the reciprocal relationship between the Regency Government, Village Government, and the community in the management of this tourist destination has not been optimal. The minimal involvement of the community and village government shows that the relationship between the three parties is still one-way. The Regency Government is the party that benefits the most in tourism management, while the community and village only play a passive role without getting support or benefits in accordance.

Keywords: *Relations, Government, Tourist Destinations, Community*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa semakin memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan munculnya kebijakan otonomi dan desentralisasi, desa kini dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Tidak hanya cara pandang terhadap desa yang berubah, transformasi ini juga telah mendefinisikan ulang peran desa dalam pembangunan. Desa yang dulunya sering dipandang sebagai objek pembangunan, kini telah menjadi entitas mandiri yang dapat mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Hal ini memberikan peluang bagi desa untuk menggali dan mengoptimalkan potensi lokal baik berupa sumber daya alam, sosial, maupun budaya. Desa dapat berperan lebih besar dalam mengembangkan perekonomiannya, termasuk potensi pariwisata setempat, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan dana desa yang disediakan oleh pemerintah pusat.

Keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang pariwisata, bergantung pada hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki akses langsung terhadap potensi dan kearifan budaya setempat, yang merupakan objek wisata. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan, sumber daya, dan kebijakan yang dapat membantu pembangunan wisata secara terencana dan berkelanjutan. Hubungan yang ideal didasarkan pada kerja sama, koordinasi, dan sinergi dalam hal ini, pemerintah daerah memberikan dukungan.

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tujuan wisata. Kabupaten Ngada memiliki potensi wisata yang luar biasa untuk dikunjungi baik berwujud wisata alam maupun wisata budaya. Tidak mengherankan jika daerah ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Ada beberapa tempat pariwisata di Kabupaten Ngada yaitu Kampung Adat Bena, Wisata Air Terjun Ogi, Puncak Gunung Inerie, Senja Di Bukit Wolobobo, Taman Laut 17 Pulau dan Wisata Pemandian Air Panas Soa. Wisata pemandian air panas ini terletak di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa yang jaraknya sekitar 25 km dari Kota Bajawa (Ibu Kota Kabupaten Ngada). Pemandian Air Panas ini merupakan salah satu objek wisata yang cukup diminati wisatawan lokal maupun mancanegara, karena memiliki potensi sumber air panas yang masih alami, dan memiliki kandungan mineral yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Pemandian Air Panas ini dikatakan sebagai objek wisata karena mengacu pada surat keputusan atau SK Bupati Ngada No. 7 Tahun 2000. Keberadaan sumber wisata Pemandian Air Panas ini dapat memberikan peluang bagi Desa Mengeruda untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, wisata ini juga dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti penyediaan makanan, kerajinan tangan dan akomodasi bagi pengunjung.

Keberadaan sektor wisata Air Panas Mengeruda memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Potensi wisata ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalankan berbagai usaha kecil, seperti membuka warung makan, menyediakan penginapan, menawarkan jasa pemandu wisata, hingga menyewakan alat-alat rekreasi. Dengan memanfaatkan peluang ini, masyarakat lokal dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan perekonomian wilayah mereka.

Namun demikian, di balik potensi besar yang dimiliki, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi dalam pengelolaan objek wisata ini. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa mengeruda dalam proses pengelolaan wisata pemandian air panas. Pada awalnya, pengelolaan objek wisata ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Mengeruda bersama masyarakat secara partisipatif. Pola pengelolaan berbasis lokal tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan memperoleh manfaat langsung dari keberadaan sektor pariwisata.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1994, ketika pengelolaan kawasan wisata dialihkan kepada pihak swasta melalui kontrak kerja sama dengan perusahaan Ngada Paradise, yang dipimpin oleh Marianus Sae, mantan Bupati Ngada. Dalam masa kontrak selama lima tahun tersebut, pihak swasta berhasil membawa sejumlah perubahan positif, seperti pembangunan fasilitas penginapan dan rumah makan untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Namun, setelah masa kontrak berakhir, pengelolaan kawasan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda sepenuhnya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata. Destinasi wisata ini kemudian ditetapkan sebagai aset milik daerah dan seluruh aktivitas pengelolaan, termasuk pemanfaatan pendapatan, dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten tanpa melibatkan Pemerintah Desa Mengeruda maupun masyarakat setempat secara aktif. Kondisi ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana desa sebagai pemilik potensi merasa terpinggirkan dalam pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberlakukan, pengelolaan objek wisata Pemandian Air Panas Mengeruda ini belum sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Mengeruda. Padahal, undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan memelihara sumber daya lokal, termasuk objek wisata. Ketentuan ini memberikan

dasar hukum bahwa desa berhak menjadi subjek pembangunan dalam pengelolaan potensi wisata lokal. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang- Undang Desa, pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda seharusnya melibatkan Pemerintah Desa Mengeruda secara aktif agar potensi wisata ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Hal ini mengindikasikan perlunya relasi yang lebih harmonis antara Pemerintah Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda dan Masyarakat. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak sangat penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah kabupaten seharusnya dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah desa untuk terlibat lebih aktif dalam pengelolaan potensi wisata di wilayahnya, misalnya melalui pembagian hasil retribusi atau pelimpahan sebagian kewenangan kepada desa. Desa di sisi lain juga perlu meningkatkan kapasitas pengelolaannya agar mampu memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Dengan adanya keterlibatan yang lebih besar dalam pengelolaan pariwisata, desa tidak hanya akan mendapatkan pendapatan tambahan, tetapi juga dapat mengembangkan potensi lokal dan sumber daya manusia yang ada di desanya. Relasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan desa dalam pengelolaan wisata lokal akan membawa manfaat yang luas, tidak hanya bagi perekonomian desa tetapi juga bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ngada.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis begitu tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relasi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Air Panas” Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda Dan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten Ngada Pemerintah Desa Mengeruda Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang menjadi fokus penelitian yaitu:

- a. Relasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah.
- b. Peran pemerintah sebagai regulating dan proteksi bagi masyarakat Desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Provinsi NTT.
- c. Hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata air panas mengeruda.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi isu yang berkaitan dengan Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten Ngada Pemerintah Desa Mengeruda Dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan terkait relasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata pemandian air panas

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hubungan dan pengelolaan bersama wisata lokal.

F. Literatur Review

Pertama, penelitian Armela Shintani yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, 2020 yang berjudul Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kelurahan Sei Gohong. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata di Sei Gohong. Hal ini dapat dilihat dari adanya Interaksi dari ketiga pemangku kepentingan tersebut yaitu: Pemerintah berperan sebagai fasilitator sementara swasta bertindak sebagai penyedia dan penyelenggara jasa serta masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengelola destinasi wisata sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan fasilitas penginapan berupa villa. Namun peran tersebut masih belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata dengan membentuk kelompok sadar wisata, menunjukan rasa peduli terhadap potensi

pariwisata yang ada di daerahnya serta pengelolaan tempat wisata Sei Gohong. Meskipun demikian kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta di Sei Gohong dalam pengelolaan wisata belum diterapkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena ada pengusaha (swasta) yang belum terlibat langsung dalam mengelola destinasi wisata di Sei Gohong. Sekarang pengelolaan destinasi wisata Sei Gohong di tangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata.

Kedua, penelitian Riana Widiastuti dan Ghifari Yuristiadhi Masyharo Makhasi yang dimuat dalam Jurnal Gama Societa, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 yang berjudul Wacana Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dominan dalam pengelolaan objek wisata Goa Pindu adalah wacana pemberdayaan, terutama pemberdayaan masyarakat. Meskipun OPW DAN BUMDes sama-sama menggunakan wacana ini, tetapi praktik keduanya berbeda. Sejak 2017, BUMDes mulai memegang pengaruh dominan dalam hal pengambilan keputusan, praktik, dan implementasi strategi pembangunan. Meskipun OPW tampak bersedia bekerja sama dan mengikuti kebijakan BUMDes, tetapi praktik wacana mereka menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap organisasi baru tersebut. Relasi kekuasaan antara OPW dan BUMDes Maju Mandiri bersifat saling mendominasi. Meskipun relasi ini terlihat setara, tetapi prakti wacana yang diterapkan berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya paradikma berpikir dan tindakan yang saling berselisih satu dengan yang lain, karena mode objektifikasi secara terus menerus. Perbedaan dalam manifestasi kekuasaan melalui praktik wacana ini menyebabkan konflik sulit diselesaikan. Ada beberapa implikasi praktik yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. Pertama, pengelolaan Goa Pindul perlu ditata ulang dengan menerapkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat harus menjadi fokus utama dengan tetap menjaga keseimbangan

antara kuantitas dan kualitas, keadilan, serta kelestarian alam, khususnya ekosistem Goa Pindul. Membangun ulang paradikma pembangunan wisata Goa Pindul dan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara bersama-sama dapat menghindarkan para pemangku kepentingan dari konflik yang berkelanjutan. Kedua, OPW dan BUMDes perlu mengedepankan pendekatan kultural dalam mengkomunikasikan ide dan kebijakan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat lebih dipahami dan diterima oleh semua pihak, dibandingkan dengan hanya menggunakan pendekatan struktural atau hukum. Ketiga, pemerintah di tingkat desa dan kabupaten dapat berperan sebagai mediator antara BUMDes dan OPW. Peran ini bertujuan untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan di antara dua pihak, sekaligus membuktikan bahwa pemerintah tidak bersikap pragmatis dalam menangani situasi di Goa Pindul. Keempat, integrasi seluruh elemen masyarakat di Bejiharjo perlu segera diwujudkan. Hal ini sangat mendesak untuk menciptakan industri pariwisata yang lebih sehat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke Goa Pindul masih cukup tinggi, keberlanjutan daya tarik wisata sangat bergantung pada penataan kelembagaan. Meskipun relasi sulit diciptakan pembangunan pariwisata yang setara, tetapi hal ini perlu diupayakan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan pariwisata bagi kehidupan sosial masyarakat Desa Bejiharjo.

Ketiga, penelitian Dona Fauziah yang dimuat dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 4, Nomor 1, Februari 2017 yang berjudul Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasa dan pengusaha membentuk hubungan yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara finansial aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambangan

emas secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan kenyamanan kepada pengusaha. Beberapa pihak aktor mengetahui tetap berjalannya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) ini seperti Bupati, Dinas ESDM, Polres Kuansing, Anggota DPRD namun kegiatan masyarakat penambang masih tetap berjalan, ini menunjukkan bahwa penertiban PETI yang dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 ini belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Dampak relasi yang terjadi sangat banyak negatifnya pada positif. Di mana dampak PETI sangat merusak lingkungan, tantanan sosial budaya masyarakat, dan juga terhadap pemerintah daerah.

Keempat, penelitian Irwan Sardi yang dimuat dalam Jurnal Analisa Sosiologi Volume 6, Nomor 2, Oktober 2017 yang berjudul Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Namgka terhadap PembukaanPerkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan relasi kuasa dan modal yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha, dapat dilihat dalam beberapa poin, yaitu: 1) Hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha lebih didasarkan pada logika instrumentalis atas dasar untung rugi yang terjadi di antara keduanya. Hal itu berhubungan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Nangka. Di satu sisi, pengusaha berupaya untuk mendapatkan lahan masyarakat untuk mencapai keinginan mereka membuka perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, aparat desa memperoleh keuntungan berupa materi dari hasil penjualan dan biaya ganti lahan kepada masyarakat. Keadaan inilah yang menjadi proses awal dalam hubungan yang dilakukan. Akibat dari hubungan ituadalah praktik negosiasi dan manipulasi terstruktur yang digunakan oleh aparat desa untuk menindas masyarakat melalui kebijakan yang telah mereka sepakati tanpa adanya partisipasi dan sosialisasi sebagai salah satu elemen penentu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan relasi dan praktik kompromis antara penguasa dan pengusaha telah melahirkan

hubungan simbiosis mutualistik. 2) Pola kekuasaan yang diterapkan oleh aparaturnya Desa Nangka adalah pola kekuasaan yang otoriter yang terwujud dalam logika dominasi sebagai wadah aparaturnya desa dalam mengarahkan masyarakat menjadi satu dimensi dari kebijakan yang mereka buat dengan pihak perusahaan. Kemudian pola-pola tersebut mempengaruhi aparaturnya desa dalam bersikap membuat kebijakan tanpa partisipasi dan hanya atas keuntungan pribadi, yang menghilangkan eksistensi masyarakat Desa Nangka untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Akhirnya, pola kekuasaan otoriter yang dijalankan oleh aparaturnya desa melahirkan konflik di dalam masyarakat. Dari keadaan itulah membuat masyarakat untuk melakukan perlawanan. 3) Perlawanan yang telah dilakukan masyarakat akhirnya melahirkan integrasi kelompok dan pembentukan solidaritas antara sesama individu yang tertindas oleh kebijakan yang tidak memihak. Integrasi yang mereka lakukan adalah melalui pembentukan suatu forum yang bernama Forum Peduli Lingkungan Desa Nangka (FPLDN). FPLDN merupakan forum yang digunakan untuk melawan aparaturnya desa sekaligus sebagai alat untuk dapat menciptakan perubahan dan akhirnya tercipta kerajaan di mana manusia menjadi tuan atas dirinya dan kerja sebagai permainan.

Kelima, penelitian Ketut Agus Gita Suprpta dan Gusti Agung Oka Mahagangga yang dimuat dalam Jurnal Destinasi Pariwisata Volume 5, Nomor 1, 2017 yang berjudul Relasi Antara Investor Pariwisata Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Pakraman Laplapan Desa Petulu, Kecamatan Ubud: Studi Kasus Konflik Sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami hubungan yang dilakukan investor pariwisata dengan komunitas lokal yang terjadi di destinasi Wisata Ubud. Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi literatur, Hasil penelitian ini menunjukan desa Pakraman Laplapan, yang terletak di kawasan Pariwisata Ubud, menghadapi dinamika hubungan yang penuh tantangan dengan para investor. Hal ini tercermin dalam regulasi yang diterapkan kepada investor, yang dianggap kurang

rasional oleh sebagian pihak. Salah satunya pemicu utama konflik antara masyarakat lokal, terutama petani pemilik lahan, dengan investor pariwisata adalah faktor ekonomi, khususnya dalam persaingan memperebutkan sumber daya ekonomi yang terbatas. Desa Pakraman Laplapan juga mengajukan tuntutan agar para investor berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat lokal dengan memperkerjakan warga desa setempat sebesar 40% dari total tenaga kerja mereka. Tuntutan ini mencerminkan upaya masyarakat untuk memastikan bahwa manfaat dari pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh penduduk lokal.

Keenam, penelitian Grein George Theodoron dan Tri Nugroho yang dimuat dalam Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) Volume 3, Nomor 3 2022 yang berjudul Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Kampung Dalam Pengembangan Kampung Wisata Berab, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berab dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa relasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam pengembangan Desa wisata Berap pada tahun 2022 mencerminkan dinamika yang kompleks. Kolaborasi antara ketiga pihak ini menghasilkan sejumlah output, seperti pembangunan fasilitas pondok di objek wisata di Kaliburu, yang menjadi langkah awal dalam pengembangan kawasan tersebut. Namun, untuk mencapai outcome yang lebih luas, yakni pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan Kampung Berab sebagai destinasi wisata, masih terdapat hambatan yang signifikan. Proses pengelolaan objek wisata belum ditangani oleh pihak yang tepat, sehingga menunjukan sikap tertutup dan kurang percaya terhadap pemerintah maupun pihak swasta, yang turut menghambat proses kolaborasi dan pembangunan.

Ketuju, Penelitian Sit J.K.S.Oramahi, Syahrin Badrian Kamahi, Boli Tonda Baso yang dimuat dalam Jurnal Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 4, 2024 yang berjudul Relasi Kuasa Dalam Tata Kelola Objek Wisata Pantai Sebanjar: Study Relasi Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Sebanjar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan relasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap masyarakat sekitar dan selaku pemilik lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan objek wisata tidak selalu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peran pemerintah sebagai pengelola objek wisata Pantai Sebanjar. Dalam proses pengelolaan, muncul kendala karena pemilik lahan mengklaim bahwa tanah yang sudah dikembangkan tersebut merupakan milik komunitas suku, bukan tanah perseorangan. Tanah tersebut sebelumnya dihibahkan oleh pihak keluarga yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Pemilik lahan meminta agar pengelolaan dilakukan secara adil dan seimbang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurangnya relasi kekuasaan yang efektif antara pemerintah dengan pemilik lahan maupun masyarakat setempat.

Kelapan Penelitian yang dilakukan oleh Nuryah Asri Sjafirah, Dian Wardiana Sjuchro, dan Heru Ryanto Budiana (2020) yang berjudul “Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Suntenjaya Sebagai Community Based Tourism” hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi merupakan kata kunci untuk mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Community Based Tourism. pelaksanaannya kosep Community Based Tourism ini tergantung pada kemampuan pemimpin masyarakat dalam hal ini pemerintah setempat untuk merangkul masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam konteks pembangunan desa wisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan literatur dari delapan jurnal yang telah dikaji, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu umumnya membahas hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan destinasi wisata, serta mengidentifikasi dinamika dan tantangan kolaborasi di antara ketiga pihak tersebut. Misalnya, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat sering kali kurang optimal, ditandai dengan ketidakpuasan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan, penelitian ini secara khusus menyoroti relasi kuasa antara Pemerintah Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda, dan Masyarakat dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana struktur kekuasaan memengaruhi pengelolaan wisata lokal, serta menekankan pentingnya kolaborasi yang harmonis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat setempat dan pengembangan ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengacu pada temuan dari penelitian sebelumnya, tetapi juga memperluas wawasan tentang peran relasi kuasa dalam pengelolaan wisata yang berkelanjutan.

G. Kerangka Konseptual

a. Relasi Kuasa

George Hilery Jr. mendefinisikan relasi sebagai sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan interaksi satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang saling mengenal dan mendukung (Santoso, 2017). Selanjutnya, Hartono Widodo dan Judiantoro menyatakan bahwa relasi juga berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu aktivitas pengerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur demi kepentingan pihak lain yang memberikan perintah, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama (Afif & Nawawi, 2022).

Pengaruh yang terjadi dalam suatu hubungan interaksi atau relasi dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk kuasa. Ketika seseorang mampu memengaruhi hubungan interaksi dengan suatu objek, maka orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memiliki kemampuan untuk menguasai. Dalam memahami sebuah kekuasaan seperti halnya pada pemikiran pemikiran Michel Foucault, yang mana merupakan seorang filsuf yang terkenal sebagai pelopor strukturalisme. Pemikiran beliau menyatakan bahwa kekuasaan adalah dimensi dari relasi. Istilah yang sederhana di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kekuasaan Menurut Foucault (1984) pada umumnya berbeda dengan pantangan para ahli dan masyarakat awam yang memandang suatu kekuasaan. Kekuasaan yang eksis dipahami dan kerap dibicarakan sebatas sumber daya ataupun pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk menjalankan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam hal ini tentu saja kekuasaan diartikan secara represif atau mungkin sering kali opresif seperti halnya yang banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial lainnya.

Kekuasaan yang di cetuskan oleh Michel Foucault (1984) mengarah pada pemahaman yang sangat orisinal. Bagi Foucault kekuasaan tidak hanya sekedar dimiliki atau dipraktikkan dalam suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat banyak, sehingga posisi tersebut dianggap strategis untuk mempengaruhi satu sama lain. Penekanan bahwa kekuasaan lebih dominan pada individu dan subjek dalam lingkup kehidupan yang paling kecil. Sebab, pada dasarnya kekuasaan akan menyebar bahkan tanpa dialokasikan, sehingga meresap ke dalam setiap jalinan atau hubungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat modern, kekuasaan berlangsung hampir di semua tempat. Interaksi kekuasaan menciptakan hubungan yang saling ketergantungan antara berbagai pihak, baik pihak yang memegang kekuasaan maupun objek yang menjadi sasaran kekuasaan. Bahkan dalam fenomena kemiskinan dan keterbelakangan sekalipun dapat melahirkan kekuasaan yang identik dengan keuntungan sepihak, baik untuk diri sendiri maupun untuk sekelompok orang. Oleh sebab itu, Foucault istilah kuasa (*power*) di sini menunjuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Foucault lalu membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, di antaranya:

- a. Relasi kuasa sebagai “permainan strategis” (*strategy games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsep ini, kuasa menentukan relasi antara mitra dalam suatu ensemble tindakan-tindakan.
- b. Relasi kuasa sebagai “dominasi” (*domination*). Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan

subyek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris di mana di dalamnya orang-orang yang ter subordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas oleh karena efek dari kuasa.

- c. Relasi sebagai bentuk pemerintahan (*Government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam arti mengarahkan atau mengontrol tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atau pihak lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang terwujud dalam hubungan timbal-balik yang terjadi.

Kendati demikian, berdasarkan pemaparan berbagai konsep tentang relasi kuasa, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan teori Michel Foucault (1984) dalam mengkaji hubungan kekuasaan antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam konteks pengelolaan wisata air panas di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Pendekatan ini dianggap relevan karena konsep relasi kuasa menurut Foucault tidak hanya melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat hierarkis dan terpusat, tetapi juga sebagai mekanisme yang tersebar melalui berbagai interaksi, praktik sosial, dan wacana yang terbentuk di masyarakat. Dalam kasus pengelolaan wisata, relasi kuasa ini mencerminkan bagaimana pemerintah kabupaten memposisikan dirinya dalam membentuk kebijakan, memberikan arahan, serta mengelola sumber daya yang ada, sekaligus memengaruhi peran pemerintah desa dan masyarakat lokal. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk memahami pola interaksi, konflik kepentingan, dan negosiasi kekuasaan yang terjadi di antara ketiga aktor tersebut, serta dampaknya terhadap pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

b. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi, kata “pemerintah” berasal dari kata “perintah” yang kemudian mengedepankan imbuhan “pe” menjadi “pemerintah”, yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Dalam kata dasar “perintah” terdapat empat unsur penting:

- a. Ada dua pihak, yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Maka dari itu, pemerintah diartikan sebagai perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya). Pemerintah merupakan semua aparatur atau alat pelengkapan negara dalam rangka menjalankan segala tugas dan kewenangan atau kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Apa bila kita lihat pada negara Indonesia saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Menurut Salam pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah,

lembaga pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Pendong et al., 2020).

Pemerintah merupakan aktor sentral dalam perkembangan suatu destinasi wisata. Akses yang kuat terhadap kekuasaan dan sebagai penentu kebijakan dalam usaha pengembangan suatu destinasi wisata menjadi modal utama sektor pemerintah berkontribusi dalam kegiatan wisata (Armela Shintani, 2021). Pemerintah sebagai wadah yang memfasilitasi berbagai aktor yang bekerja untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata. Sebagai aktor sentral, pemerintah memiliki akses yang kuat terhadap kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk merancang kebijakan yang dapat mendukung, mengatur, dan mengembangkan sektor pariwisata. Dalam hal ini, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi modal utama yang memungkinkan sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan berdampak positif terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Pada umumnya pengembangan objek wisata merupakan tanggung jawab pemerintah. Menurut Sutoro Eko (2021: 4) pemerintah atau (*Government*) adalah supreme authority dalam arena pemerintahan seperti Negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen. Sutoro Eko (2021:4) menjelaskan beberapa makna tentang pemerintah. *Pertama* Pemerintah sebagai subjek. Apabila mengikuti logika idealisme konstitusional-demokratis, maka yang memerintah adalah pemerintah beserta parlemen yang hadir sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat. Namun, realisme berasumsi bahwa yang memerintah bukan hanya pemerintah, tetapi secara de facto yang memerintah ada banyak aktor seperti negara, birokrasi, konsultan, teknokrat, dan prangkat.

Pemerintah sebagai subjek memiliki makna idealisme filosofis yang dalam. Dari Karl Polanyi (1944), kita tahu bahwa pemerintah dibuat untuk keperluan distribusi dan proteksi, terutama perlindungan orang-orang lemah dari rampasan kaum elite. Pemerintah dibentuk oleh rakyat dan pemerintah bekerja untuk membebaskan warga sebagai pemilik negara.

Konsep pemerintah mencakup subjek yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan atau pemberian pemerintahan. Subjek ini dapat berubah individu, seperti kepala desa, bupati atau wali kota, gubernur, hingga presiden, yang masing-masing berperan langsung dalam mengelola urusan pemerintahan. Selain itu, subjek pemerintah juga dapat berupa lembaga, seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pemerintah republik Indonesia. Pemerintah dalam arti sempit hanya mengacu pada unsur eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas meliputi eksekutif dan legislatif. *Kedua* pemerintah berkaitan dengan predikat dan objek yaitu apa dan siapa yang diperintah. Kata “apa” yang diperintah, memiliki elemen luas tidak hanya berbicara perkantoran dan administrasi atau pagar kantor bupati, tetapi kata “apa”sejatinya berbicara tentang hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak mengandung relasi kuasa antara pemerintah dengan orang-orang yang berkepentingan, misalnya: berbicara terkait beras maka akan bertemu bermacam- macam aktor seperti petani, tengkulak, pedagang, dan konsumen. Kata “siapa”yang diperintah adalah negara, warga dan masyarakat. Lalu kata “di mana”menyebut tempat atau arena bagi proses memerintah, baik pada bentuk komunitas, desa, daerah, negara dan dunia

Ketiga Pemerintah dalam masyarakat. Pemerintah dan masyarakat (*local self government*) yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekadar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering the state*) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” memberikan distribusi dan

proteksi kepada warga, sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum. Pemerintah lebih mungkin efektif ketika mereka dapat menghasilkan persetujuan bersyarat, atau setidaknya kepatuhan semu sukarela (Margaret Levi, 2006). Pemerintah dalam masyarakat adalah milik rakyat, yang dibentuk cara politik oleh rakyat. Rakyat adalah konsep politik. Negara adalah milik warga. Warga adalah subjek hukum yang memiliki persamaan hak- kewajiban terhadap negara. Pemerintah bukan sekadar penyelenggara negara. Pemerintah berbeda dengan negara. Birokrasi adalah *the real state*. Negara bersifat statis yang tidak berhubungan dengan demokrasi, melainkan berhubungan dengan sentralisasi, birokratisasi, unifikasi dan koersi. Demokrasi berada pada rana pemerintah, yang membuat pemerintah lebih dinamis dalam melakukan tindakan politik dan membuat hukum. Hukum bukan hanya membatasi kekuasaan, tetapi ia adalah ekspresi kehendak politik dan otot besar pemerintah (*the great sinew of government*) untuk memerintah negara.

a. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan definisi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibanya, termasuk dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Fungsi pemerintah yaitu mengerakan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran. Peran pemerintah meliputi:

- a) Pemerintah sebagai fasilitator: menciptakan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan menjebatani berbagai kepentingan masyarakat, memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan ketrampilan, dan pemberian bantuan modal.
- b) Pemerintahan sebagai regulator: menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Menurut Hoessein menjelaskan bahwa konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep *local government* yang mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama pemerintah lokal, kedua pemerintahan lokal, dan ketiga daerah otonomi. Pada pengertian pertama pemerintah lokal menunjukan badan atau lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada badan atau lembaga yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah, dalam arti Indonesia merujuk pada kepala daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan pemerintah lokal pada pengertian kedua merujuk pada kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Deki, 2019).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini pada hakekatnya mempunyai fungsi penting yang berfungsi untuk menciptakan kebijakan pemerintah daerah, yang menjadi dasar atau arah penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga merujuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia daerah otonom adalah daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang di percaya oleh

pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Menurut Pitana dan Gayatri dalam (Anggraeni & Fadlurrahman, 2018) mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar terlihat usaha pariwisata terus berjalan. Pemerintah daerah berperan dalam mendorong semangat serta minat masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Dengan memberikan motivasi ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata, seperti dengan memanfaatkan keahlian atau kearifan lokal yang dimiliki untuk menjadi daya tarik wisata, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh dinas pariwisata yang ada di daerah. Dengan kata lain *fasilitator* pemerintah berperan memfasilitasi segala kegiatan dan penunjang yang mendukung serta diperlukan dalam pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang mana dalam prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan pihak desa dan masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Sebagai salah satu pelaku pembangunan pariwisata, pemerintah daerah berperan dalam sinergi antar ketiga pihak tersebut, sehingga tercipta relasi simbiosis, dan saling menguntungkan antar ketiga pihak untuk kepentingan pembangunan pariwisata.

Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengembangan pariwisata, sangat penting dan saling mendukung. Pemerintah daerah berfungsi sebagai pengarah dan pengelola kebijakan yang lebih luas, sementara pemerintah desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal. Ada beberapa poin hubungan yang dapat menjelaskan interaksi antara keduanya, Pertama Koordinasi Kebijakan, pemerintah daerah menetapkan kebijakan umum yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, sedangkan pemerintah desa mengimplementasikan kebijakan tersebut di wilayahnya. Pemerintah desa perlu memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan program yang sesuai dengan visi dan misi daerah. Kedua Fasilitasi dan Dukungan, pemerintah daerah sebagai fasilitator memberikan dukungan berupa anggaran, infrastruktur, serta pelatihan kepada pemerintah desa agar mereka dapat mengelola potensi pariwisata secara efektif. Pemerintah desa, dengan pengetahuan lokal, melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan budaya di tingkat desa. Ketiga Sinergi dalam Pengelolaan Wisata, dalam pengembangan potensi wisata, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat penting.

Pemerintah desa memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kearifan lokal dan potensi wisata setempat, sementara pemerintah daerah dapat memberikan akses lebih luas dan sumber daya untuk memajukan pariwisata. Kedua pihak harus bekerjasama untuk menciptakan program-program yang dapat meningkatkan daya tarik wisata tanpa merusak budaya dan lingkungan lokal. Keempat Peran dalam Masyarakat, pemerintah daerah bertindak sebagai motivator dan penggerak yang mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata.

Pemerintah desa memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal dengan cara melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pariwisata, memanfaatkan keahlian dan kearifan lokal. Kelima Monitoring dan Evaluasi, pemerintah daerah bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan rencana dan tidak merugikan pihak manapun.

b. Pemerintah Desa

Secara etimologi, kata desa berasal dari kata Sansekerta “deka” yang berarti rumah kampung halaman, atau tempat lahir, secara geografis desa desa didefinisikan sebagai “kumpulan rumah dan bisnis pedesaan yang lebih kecil dari kota. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga atau komunitas dengan sistem pemerintahan sendiri yang diakui dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa-desa di Indonesia telah melalui perjalanan panjang sepanjang sejarah. Bahkan sebelum negara ini resmi berdiri, desa-desa sudah menjadi fondasi awal pembentukan masyarakat politik dan sistem pemerintahan (Rukayat, 2021). Pada masa tersebut, desa berperan sebagai komunitas kecil yang menyerupai rumah tangga besar, dipimpin oleh tokoh yang dianggap

dianggap paling layak atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Menurut Sumpeno (dalam Rukayat, 2021:8), interaksi dan komunikasi antar warga pada masa itu masih sangat terbatas, terutama di pedesaan yang terpencil dan terisolasi. Menurut H.A.W. Widjaja desa merupakan sebuah komunitas hukum yang memiliki struktur asli yang didasarkan pada hak-hak tradisional yang bersifat khusus (Sugiman, 2018). Menurut Zakaria, desa dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu, yang memiliki serangkaian peraturan yang dibuat secara mandiri, dan berada dalam sebuah wilayah yang dipimpin oleh pemimpin yang dipilih dan ditetapkan oleh mereka sendiri. Dengan kata lain, desa merupakan satuan kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan dengan kesamaan asal-usul yang didalamnya diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat serta disetujui oleh seluruh anggota yang ada didalamnya.

Pemerintah desa adalah elemen dalam sistem pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa. Dalam struktur ini, pemerintah desa dan BPD memiliki peran sebagai mitra dalam pemerintahan dan pembangunan desa, bekerja sama untuk mengelola jalannya pemerintahan di tingkat desa.

c. Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekelompok individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat disebut sebagai “society” yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan

manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: Interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas.

Menurut Ralph Linton (Yusuf et al., 2020) Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurut Emile Durkheim (Taluke et al., 2019), bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sebuah bentuk kehidupan yang berada dalam suatu wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama yang memiliki identitas ,interaksi, kebiasaan (adat istiadat), kebersamaan, serta cara hidup bersama yang diatur oleh (norma-norma) dan aturan sosial yang berlaku.

d. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan adalah kegiatan mengubah sesuatu agar menjadi lebih baik atau bernilai dari sebelumnya. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (dalam Suawa et al., 2021) menjelaskan bahwa pengelolaan adalah istilah yang dipakai dalam manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah” (*tomanage*) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Dari pendapat pemuji mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Air Panas Mengeruda adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif merupakan penelitian yang berusaha menggali sedalam-dalamnya mengenai suatu permasalahan serta berusaha untuk mendapatkan sebab-akibat dari suatu fenomena sosial. Penelitian eksploratif bertujuan untuk mendapatkan hasil peneliti sedetail mungkin mengenai relasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata air panas. Sedangkan dasar peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif yakni peneliti ingin mengetahui secara mendalam tentang relasi pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata Air Panas Mengeruda. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan tindakan dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu khusus yang alamia dan memanfaatkan berbagai metode alamia (Lexy J, 2017).

b. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan objek penelitian, subjek penelitian, dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu, sesuai dengan fokus penelitiannya. Adapun unit analisis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif Menurut spradley (dalam Sugiyono, 2017) terdiri dari tiga komponen yaitu tempat (*place*) plaku, (*actor*) dan aktivitas (*activites*). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka obyek penelitian ini, yaitu: Pertama, tempat (*place*) Wisata Air Panas Desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Kedua, pelaku (*actor*) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa Dan Masyarakat. Ketiga, aktivitas (*activites*) adalah Pengelolaan Wisata Air Panas. Jadi objek penelitian ini adalah Relasi pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata air panas di Desa Mengeruda.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 1.1
Data Informasi Peneliti

No	Nama Informan	Jabatan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Dominikus Oskar Gae	Kepala Desa	Laki-laki	S1
2.	Yohane A.Ngoe Leo	Sekertaris Desa	Laki-Laki	SLTA
3.	Oktavianus Botha Djawa	Kepala Dinas Pariwisata	Laki-Laki	S2
4.	Theodosius Yosefus Nono	Pegawai Dinas Pariwisata	Laki-Laki	S1
5.	Bety	Pegawai Dinas Pariwisata	Perempuan	S1
6.	Yohane Wilhelmus	Masyarakat Penjual Jajan	Laki-Laki	SLTA
7.	Mersiana Mau	Masyarakat Penjual Makanan Khas Daerah	Perempuan	SLTP
8.	Theresia Deku	Masyarakat Penjual Sovenir	Perempuan	SLTP
9.	Maria Moi	Masyarakat Makanan	Perempuan	SLTA
10.	Yosep Thena	Tokoh Masyarakat	Laki-Laki	SLTP

Sumber: Datpangan Peneliti 2024

Berdasarkan pada tabel di atas, informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang (sepuluh orang) dengan latar belakang profesi, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Informan dalam penelitian ini mencakup perangkat desa, pegawai dinas pariwisata, serta masyarakat lokal. Peneliti memiliki informan dari pemerintah kabupaten khususnya dinas pariwisata karena mereka yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan destinasi wisata pemandian air panas. Sedangkan pemerintah desa karena mereka berperan dalam menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah kabupaten, terutama dalam hal pengelolaan destinasi wisata yang saat ini dikendalikan oleh pemerintah kabupaten. Masyarakat juga memegang peran penting dalam menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pariwisata. Selain itu informasi dari masyarakat sangat penting karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Wisata Pemandian Air Panas Desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”. Penggunaan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi dan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian untuk memahami fenomena secara mendalam. Observasi, atau yang sering disebut pengamatan, melibatkan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek atau peristiwa dengan memanfaatkan seluruh alat indra, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Dalam proses ini, pengamatan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tampak secara fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan interaksi yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi yang berkembang di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah kabupaten dan pengelolaan wisata air panas, serta bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu, interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat, terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Peneliti juga mengamati kondisi fisik dan infrastruktur wisata air panas, seperti akses jalan, tempat parkir, kebersihan, dan fasilitas pendukung lainnya. Mengamati aspek sosial budaya juga diperhatikan, yaitu bagaimana wisata air panas berhubungan dengan kebudayaan setempat dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan sekitar dan mengamati dampak ekonomi dari pengelolaan wisata, termasuk kontribusi terhadap perekonomian desa, baik dari sektor pendapatan pemerintah desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu yang dilakukan dengan maksud tertentu (Moleong 2007).

Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata air panas yang bertujuan untuk mengali informasi yang dibutuhkan peneliti.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti Profil Desa Mengeruda, RPJMD Rencana Kerja Pemerintah Desa, Dokumen kebijakan atau regulasi. Peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa, foto fasilitas atau destinasi wisata yang dikelola. Audio rekaman wawancara dengan pemerintah, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata pemandian air panas.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

a. *Reduksi Data* (Pengumpulan Data)

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan mengfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono 2017: 135).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai relasi antara pemerintah kabupaten, desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata di Desa Mengeruda. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat. Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi objek penelitian, Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dipilih dengan hati-hati untuk fokus pada hal-hal yang penting, seperti tema, pola, dan isu-isu utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, pengumpulan data menjadi lebih terarah, sehingga menghasilkan informasi yang lebih jelas dan berguna untuk analisis lebih lanjut.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan hasil reduksi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil reduksi data secara sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami oleh pembaca. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dari wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti pejabat daerah, desa dan masyarakat, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola penting. Data yang telah dianalisis disajikan dalam

bentuk narasi, yang memudahkan pembaca untuk memahami informasi baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagian yang lebih spesifik. Selain itu, setiap data yang disajikan juga diberikan penjelasan atau interpretasi yang relevan, sehingga pembaca dapat memahami konteks dan makna dari informasi tersebut dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian yang telah direduksi dan disajikan oleh peneliti dengan cara verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dari rumusan pertanyaan peneliti yang dicari selama proses penelitian.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses analisis data yang telah direduksi dan disajikan dengan jelas. Penarikan kesimpulan dimulai dengan memverifikasi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar relevan dan konsisten dengan tujuan penelitian. Peneliti kemudian menghubungkan temuan-temuan dari data yang dianalisis dengan rumusan pertanyaan penelitian, serta mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul selama proses analisis. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dicari selama proses penelitian, yang didasarkan pada data yang valid dan telah diverifikasi. Dengan langkah ini, peneliti dapat menyusun kesimpulan yang memberikan gambaran menyeluruh dan relevansi terhadap isu yang diteliti.

BAB II

PROFIL DESA MENERUDA DAN DESKRIPSI DESTINASI

WISATA PEMANDIAN AIR PANAS MENERUDA

A. Profil Desa Mengeruda

1. Sejarah Desa Mengeruda

Desa Mengeruda merupakan salah satu desa dari 16 (enam belas) desa yang ada di wilayah Kecamatan Soa yang cukup dikenal dengan tempat pariwisata : Air Panas. Sejak dulu Desa ini sering dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Sejarah terbentuknya desa Mengeruda tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya Kecamatan Soa. Kecamatan Soa merupakan Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Ngada Nomor 12 Tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 15 Desember 2000 oleh Bapak Bupati Ngada dengan jumlah 10 Desa yaitu Desa Mainai, Denatana, Nginamanu, Waepana, Seso, Masu, Piga, Loa, Tarawaja dan Mengeruda.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul aspirasi masyarakat Mainai, Denatana dan Nginamanu untuk membentuk sebuah Kecamatan baru ada aspirasi tersebut dan disetujui oleh Pemda Ngada bersama DPRD Ngada dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007. Sebagai tindak lanjutnya, maka pada tanggal 03 Maret 2007 Kecamatan Wolomeze dibentuk dan diresmikan oleh Bapak Bupati Ngada. Desa Mengeruda adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Piga pada Tahun 1998 dengan status desa Persiapan dan menjadi Desa definitive pada tahun 2000. Nama Desa Mengeruda di ambil dari kata Menge dan Ruda. Menge artinya manis atau harum dan Ruda artinya pohon teduh yang menaungi orang yang berada di bawah naungannya. Dari gabungan kedua kata ini membentuk

kata Mengeruda yang berarti : pohon yang harum mewangi dan menjadi tempat naungan bagi semua orang yang berlindung di bawah-nya.

2. Kondisi Geografis Desa Mengeruda

Kondisi geografis adalah kondisi suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Secara administrasi Desa Mengeruda merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki luas wilayah 8,25 km² atau 8.250 ha dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 7 km yang ditempuh dengan kendaraan dalam waktu \pm 10 menit. Desa Mengeruda terletak di bagian timur dari Kecamatan Soa yang berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo.

a. Batas Wilayah Desa Mengeruda

Tabel 2.1 Batas-batas Wilayah Desa Mengeruda

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Piga	Soa
Selatan Selatan	Desa Bogoboa	Soa
Sebelah Timur	Kelurahan Olakile	Boawae
Sebelah Barat	Desa Loa	Soa

Sumber: Data Profil Desa Mengeruda Tahun 2024

Dari data tabel di atas menunjukan bahwa batas-batas wilayah Desa Mengeruda, yaitu; Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Piga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bogoboa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Olakile, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loa.

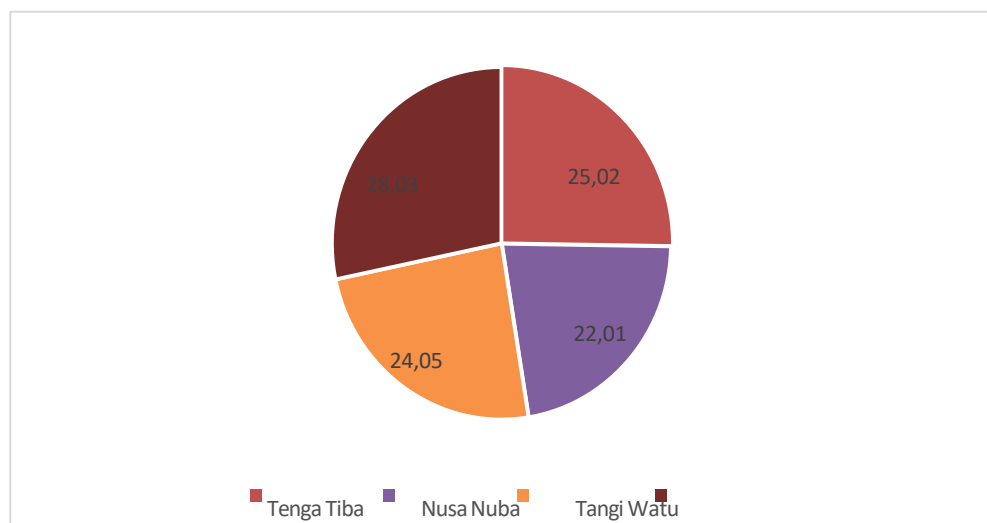
b. Luas Wilayah Desa Mengeruda

Luas wilayah Desa Mengeruda adalah 1.200 ha atau 12 km persegi (km²) yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun. Letak Desa Mengeruda sangat strategis karena berada di jalan kabupaten penghubung antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo serta jalan utama menuju Bandar Udara Soa. Hal ini membuat potensi di bidang perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan semakin menggeliatnya penduduk yang mata pencahariannya adalah berdagang.

c. Pembagian Wilayah Desa Mengeruda

Desa mengeruda memiliki 4 Dusun yang terdiri dari 14 Rukun Tetangga diantara lain:

Gambar Diagram 2.1 Jumlah KK Per Dusun



Sumber : Profil Desa Mengeuda 2025

Berdasarkan diagram lingkaran yang menggambarkan distribusi jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Mengeruda, dapat diketahui bahwa Dusun

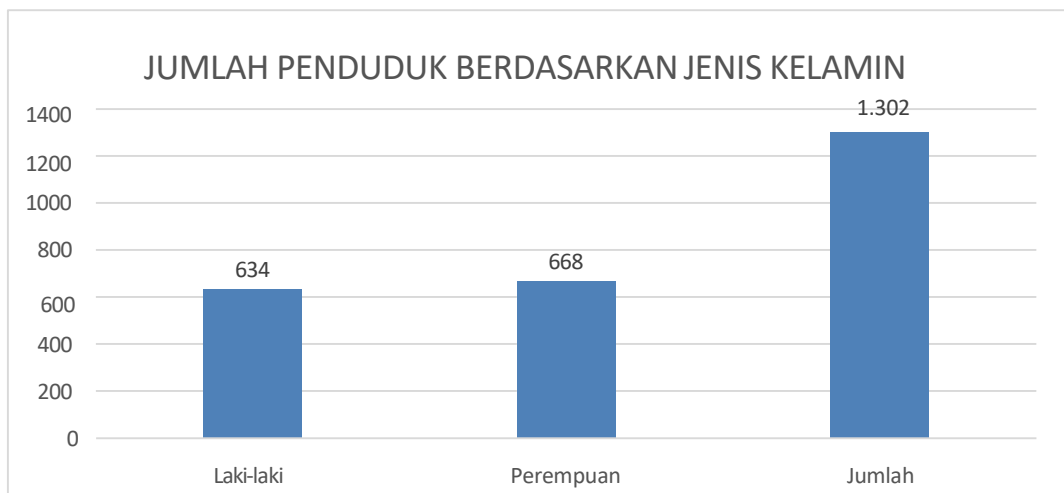
Nunu Bolo memiliki jumlah KK terbanyak, yaitu 82 KK, atau 28,03%. Sedangkan jumlah KK paling sedikit berada di Dusun Nusa Nuba yaitu 64 KK atau 22,01%.

3. Kondisi Demografis

Kondisi demografis merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian migrasi serta penuaan. Jumlah penduduk Desa Mengeruda pada tahun 2024 mencapai 1.302 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 634 jiwa dan perempuan sebanyak 668 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 290 di Desa Mengeruda. Penduduk Desa Mengeruda tersebar di 4 Dusun 14, Rukun Tetangga (RT)

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar Diagram 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin



Sumber: Profil Desa Mengeruda 2024

Dari data yang tersedia, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Mengeruda mencapai 1.302 jiwa. Menariknya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 668 jiwa perempuan dan 634 jiwa laki-laki. Selisih ini

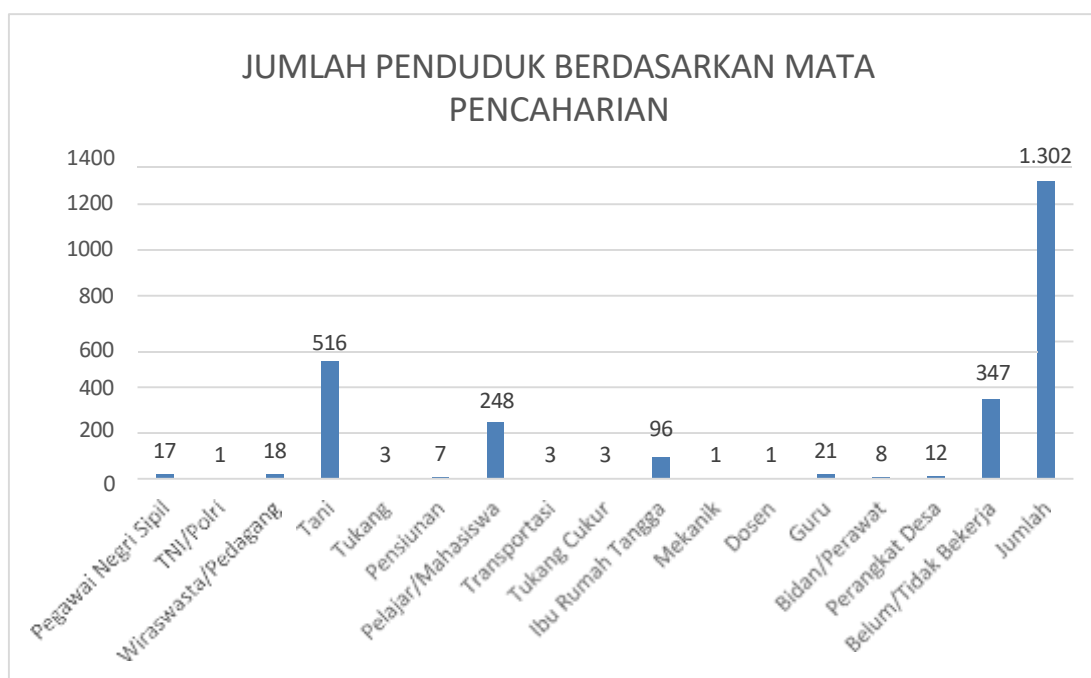
mencerminkan adanya dominasi jumlah penduduk perempuan di wilayah Desa Mengeruda. Dominasi jumlah perempuan ini menjadi fenomena demografis yang menarik untuk dicermati lebih lanjut, karena dapat memberikan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan desa. Secara sosial, tingginya jumlah perempuan membuka peluang besar bagi pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, baik dalam rumah tangga, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Perempuan dapat menjadi aktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga, mengembangkan UMKM, hingga mengambil peran strategis dalam kelembagaan masyarakat seperti PKK, kelompok tani perempuan, dan koperasi. Dari sisi ekonomi, peningkatan peran perempuan juga dapat mendukung diversifikasi sumber pendapatan keluarga. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan potensi desa seperti sektor pertanian dan pariwisata. Perempuan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hasil pertanian, pengolahan makanan lokal, serta penyediaan jasa pendukung wisata seperti kuliner, kerajinan tangan, hingga homestay. Ini menjadi peluang besar dalam menciptakan ekonomi kreatif berbasis perempuan yang mampu menggerakkan roda perekonomian desa secara lebih inklusif.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian di Desa Mengeruda:

Gambar Diagram 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian



Sumber: Data Profil Desa Mengeruda 2024

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat dengan jelas bahwa mata pencapaian utama masyarakat di Desa Mengeruda masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan jumlah mencapai 516 orang. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya yang tersebar di masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan menjadi sumber kehidupan utama bagi sebagian besar warga desa. Dalam diagram batang yang disajikan, terlihat bahwa jenis pekerjaan masyarakat di Desa Mengeruda sangat beragam, mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang majemuk. Selain bertani, masyarakat juga menggantungkan hidup pada sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, buruh harian, pegawai negeri, maupun

sektor informal lainnya. Keberagaman ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang positif, di mana masyarakat tidak hanya terpaku pada satu sektor ekonomi saja, melainkan juga mulai merambah berbagai bidang pekerjaan yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kondisi ini tentu menjadi peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya keragaman dalam mata pencaharian, maka perputaran ekonomi dalam desa dapat berlangsung secara lebih stabil dan berkesinambungan. Masyarakat yang bekerja di sektor non-pertanian, seperti jasa atau perdagangan, dapat menciptakan efek multiplier bagi hasil-hasil pertanian yang mereka konsumsi dan distribusikan. Sebaliknya, pertanian sebagai sektor dominan tetap menjadi fondasi kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung kestabilan ekonomi masyarakat. Selain itu, keanekaragaman jenis pekerjaan ini juga dapat menjadi modal sosial dan ekonomi dalam pengembangan sektor pariwisata yang sedang tumbuh, seperti objek wisata pemandian air panas di Mengeruda. Apabila dikelola dengan baik dan inklusif, keberagaman keterampilan dan profesi masyarakat ini bisa disinergikan untuk mendukung pengembangan wisata berbasis masyarakat (community-based tourism). Dengan demikian, tidak hanya sektor pertanian yang berkembang, tetapi juga sektor lain seperti ekonomi kreatif, jasa transportasi, kuliner, dan penginapan dapat turut tumbuh.

4. Prasarana Desa Mengeruda

a. Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar terencana dengan tujuan menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan dapat memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian yang baik, ahlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri serta masyarakat. Ketersediaan sarana pendidikan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan dapat meningkatkan pola pikir mereka. Situasi dan perkembangan pendidikan di Desa Mengeruda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain (KB)	1 Unit
2.	Taman Kanak-Kanak	1 Unit
3.	SD	1 Unit
4.	SMP	1 Unit
	Jumlah	4 Unit

Sumber: Data Profil Desa Mengeruda 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah prasarana pendidikan di Desa Mengeruda tergolong cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai fasilitas pendidikan yang tersedia, seperti satu sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satu Taman Kanak-Kanak (TK), satu Sekolah Dasar (SD), dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Meskipun demikian, di Desa Mengeruda belum terdapat sarana pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

b. Prasarana Kesehatan

Tabel 2.3 Jumlah Prasarana Kesehatan

Jenis Prasaran Kesehatan	Jumlah
Poskesdes/Polindes	1 Unit
Posyandu	1 Unit
Jumlah	2 Unit

Sumber: Data Profil Desa Mengeruda 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa prasarana kesehatan di Desa Mengeruda masih belum memadai. Hal ini dikarenakan Desa Mengeruda hanya memiliki satu Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Pilindes, serta satu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Keterbatasan fasilitas ini tentu menjadi tantangan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini dapat menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang memadai dan tepat waktu.

c. Prasarana Keagamaan

Tabel 2.4 Prasarana Ibadah Desa Mengeruda

Jenis Prasarana	Jumlah
Kapel	1 Unit
Jumlah	1 Unit

Sumber:Data Profil Desa Mengeruda 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa fasilitas prasarana keagamaan di Desa Mengeruda tergolong cukup memadai. Salah satu fasilitas utama yang tersedia adalah kapel, yang menjadi tempat ibadah utama bagi masyarakat Desa Mengeruda. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Desa Mengeruda yang memeluk agama Katolik. Dengan adanya kapel, masyarakat dapat menjalankan aktiitas keagamaan mereka dengan baik seperti misa, doa bersama, dan perayaan hari besar keagamaan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Mengeruda

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Mengeruda bergerak di bidang pertanian. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dengan penghasilan utama berupa padi, jagung dan ubi-ubian. Selain pertanian, sektor peternakan juga cukup berkembang terutama dalam pemeliharaan ternak seperti sapi, babi dan ayam yang menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Mengeruda. Selain sektor pertanian, potensi ekonomi desa ini juga ditopang oleh sektor pariwisata, khususnya keberadaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun dalam pengelolaan sektor pariwisata, keterlibatan masyarakat Desa Mengeruda terbatas karena pengelolaan wisata sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngada, sehingga masyarakat desa hanya berperan sebagai pedagang di sekitar lokasi wisata atau bekerja dalam usaha kecil lainnya. Keterbatasan akses dalam pengelolaan wisata ini menjadi tantangan bagi masyarakat Desa Mengeruda dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

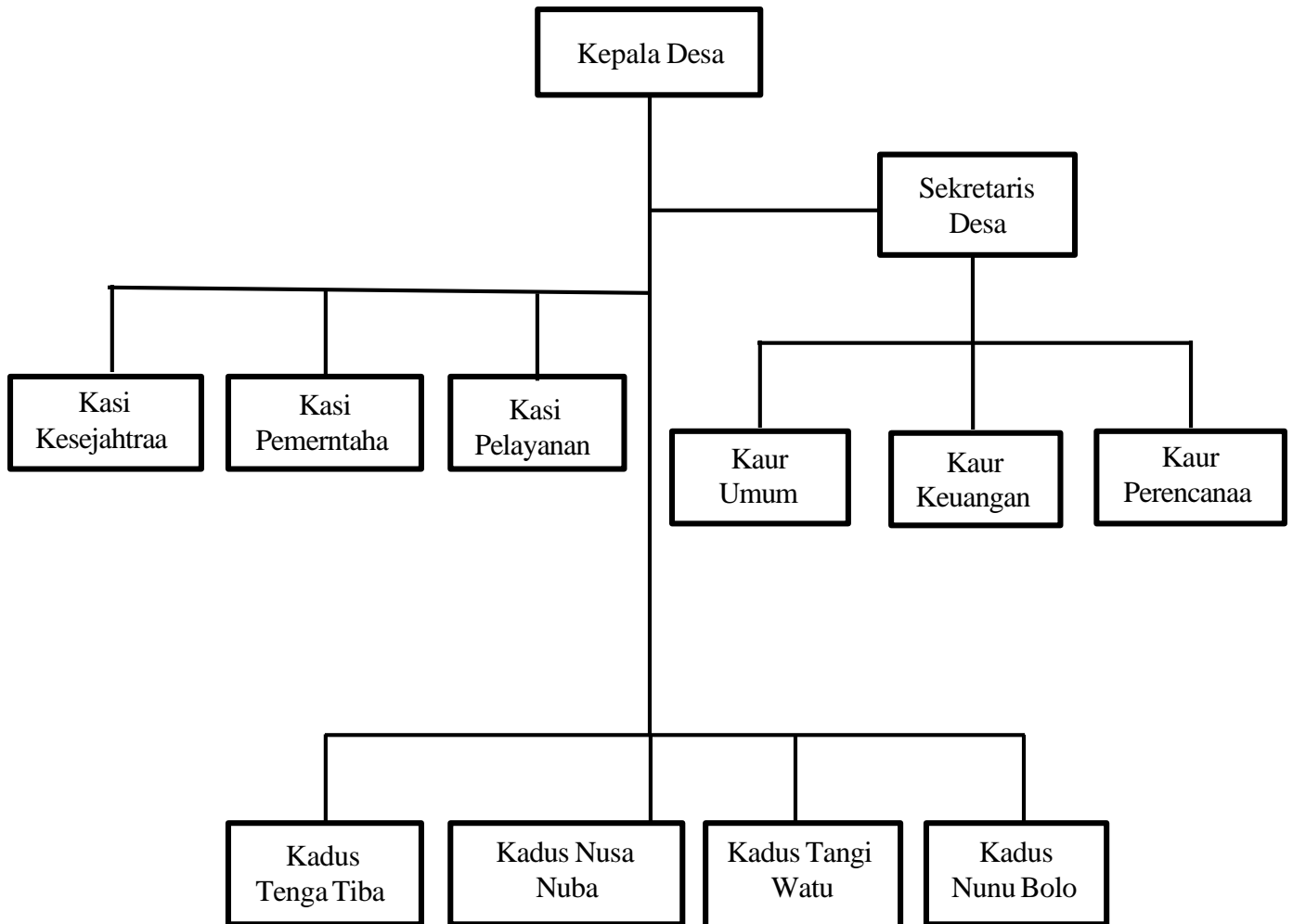
Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Mengeruda memiliki hubungan yang erat dengan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Rasa kebersamaan dan gotong royong masih sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kegiatan pertanian dan acara adat. Selain itu, Desa Mengeruda memiliki kekayaan budaya yang masih terjaga dengan baik. Tradisi yang sampe sekarang masih ada dan yang terus dilestariakan adalah *parawitu*, atau berburu adat yang rutin dilakukan setiap bulan oktober. Selain itu ada *Sagi* atau Tinju Adat, yang merupakan bentuk perayaan syukur atas hasil panen. Tradisi ini mencerminkan bagaimana kehidupan masyarakat Desa Mengeruda yang masih

sangat terkait dengan pertanian sebagai mata pencarian utama. Tidak hanya budaya yang diwariskan secara turun temurun, desa mengeruda juga memiliki nilai sejarah yang tinggi dengan keberadaan situs purbakala Cekungan So'a di daerah Matamenge. Situs ini menjadi lokasi penggalian berbagai fosil purba, seperti fosil gajah purba (*Stegodon*), fosil tikus purba, gading, ular, serta serpihan gerabah dari zaman purba.

6. Kelembagaan Dan Sruktur Organisasi

Berbicara mengenai pemerintah desa berarti mencakup Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 26, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan prangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan prangat lainnya.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mengeruda



Sumber: Profil Desa Mengeruda Tahun 2024

Tabel.2.5 Nama Prangkat Desa Mengeruda

NO	NAMA	JABATAN
1	DOMINIKUS OSKAR GAE	KepalaDesa
2	YOHANES A.NGOE LEO	SekretarisDesa
3	KATARINANIO DO	Kaur Keuangan
4	HILARIUS LOKO	Kaur Perencanaan
5	MARTINUS KAJU	Kaur Tatausaha & Umum
6	WIGBERTUS MALI TENA	Kasi Pemerintahan
7	SELVIANANIO LASA	Kasi Kesejahteraan
8	OKTAVIANA LEBO LEO	Kasi Pelayanan
9	BRUNO BETU KADJU	Kepwil Dusun I
10	TARSISIUS LOKO PODHI	Kepwil Dusun II
11	LAURENSIA BHOKO SOLA	Kepwil Dusun III
12	BENYAMIN TAI	Kepwil Dusun IV

Sumber: Profil Desa Mengeruda Tahun 2024

Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Desa Mengeruda diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Mengeruda terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang terdiri atas sekertaris desa, kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekeraris. Kepala urusan tersebut terdiri dari kepala umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Sedangkan urusan teknik terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi keseahriaan dan kepala seksi pelayanan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa. Adapun yang lain yaitu unsur kewilayahan terdiri dari Kepala Dusun yang bertugas untuk membantu Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

B. Deskripsi Objek Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda

1. Sejarah Destinasi Wisata Pemandian Air Panas

Pemandian air panas adalah salah satu potensi wisata alam yang berada di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemandian air panas ini merupakan mata air panas alami yang banyak mengalami perubahan fisik dan sekarang menjadi daya tarik wisata. Tempat ini memiliki kisah asal usul yang menarik. Sebelum dikenal dengan nama Pemandian Air Panas Mengeruda, tempat ini dulu dikenal dengan nama *Wae Sale*, yang dalam bahasa Indonesia berarti “air sale”. Nama *sale* diambil dari seorang kakek penggembala kerbau yang pertama kali menemukan mata air panas ini. Seiring berjalannya waktu tempat ini kemudian dibuka menjadi Destinasi Wisata dengan nama Air Panas Mengeruda.

Gambar 2.5 Destinasi Wisata Pemandian Air Panas



Sumber: Dokumentasi Lapangan Penelitian 2022

2. Letak Geografis Destinasi Wisata Pemandian Air Panas

Secara geografis, Air Panas Mengeruda terletak sekitar 25 kilometer dari Kota Bajawa, ibu kota Kabupaten Ngada, dan sekitar 50 kilometer dari arah selatan Riung. Akses menuju lokasi ini cukup mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Daya tarik utama dari pemandian ini adalah kolam berbentuk lingkaran yang merupakan sumber mata air panas alami. Air panas yang menyembur dari mata air ini memiliki suhu mencapai 45°C. Kolam tersebut terletak di dasar bebatuan dengan kedalaman sekitar sepinggang hingga sedada orang dewasa. Selain kolam utama, air panas mengalir ke area yang lebih dangkal menyerupai sungai kecil dengan suhu yang lebih rendah. Aliran air ini kemudian membentuk air terjun kecil yang indah sebelum bergabung dengan aliran sungai yang melewati kawasan hutan alami. Keunikan lain dari Pemandian Air Panas Mengeruda adalah sumber air panasnya yang berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Berapi Ine Lika, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi pemandian. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi aktif di wilayah tersebut, sehingga aktivitas vulkaniknya memengaruhi suhu air yang mencapai 45°C. Suasana alami yang mengelilingi pemandian ini menjadi daya tarik tersendiri. Dengan pepohonan rindang yang tumbuh di sekitar kolam dan sungai, pengunjung dapat menikmati pengalaman relaksasi yang menyenangkan. Keindahan alam yang memukau ini menciptakan suasana yang sempurna untuk bersantai sambil menikmati kehangatan air panas alami yang juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan. Pemandian Air Panas Mengeruda dipercaya memiliki khasiat penyembuhan, terutama untuk penyakit kulit dan rematik. Banyak pengunjung datang untuk merasakan manfaat terapi air panas, dengan harapan dapat membantu meringankan gejala penyakit tersebut. Selain itu, pemandian ini juga menjadi tempat yang cocok bagi wisatawan

yang ingin menikmati ketenangan alam, jauh dari keramaian kota, sekaligus merasakan sensasi berendam di air panas yang menyegarkan tubuh dan pikiran.

3. Petugas Yang Bekerja di Destinasi Wisata Pemandian Air Panas

Tabel 2.6 Petugas Yang Bekerja Di Destinasi Wisata

No	Nama Petugas	Jabatan
1.	Benediktus Podhi Tena	Kordinator
2.	Markus Lalu Mengi	Petugas kebersihan dan penataan taman
3.	Heribertus Kadjo Djo	Petugas kebersihan dan penataan taman
4.	Robertus Kristi Tanto Lebe Meo	Petugas kebersihan dan penataan taman
5.	Arkadius Wio Bhaghi	Petugas kebersihan dan penataan taman
6.	Yoseph Stefanus Rato Bhake	Petugas kebersihan dan penataan taman
7.	Stefanus Samuel Nage	Petugas kebersihan dan penataan taman
8.	Maria Alexandro Meo Moi	Petugas kebersihan dan penataan taman

Sumber: Data Lapangan Penelitian 2024

4. Daya Tarik dan Keunikan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas

Destinasi wisata pemandian air panas di Desa Mengeruda memiliki daya tarik dan keunikan sumber daya alam yang luar biasa untuk menarik wisatawan. Keberadaan sumber mata air alami yang mengalir seperti sungai ini diyakini memiliki berbagai manfaat kesehatan menjadi daya tarik utama. Selain itu, terdapat beberapa kolam air dengan variasi suhu yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berendam dan di kelilingi pepohonan yang alami yang asri. Tidak hanya menawarkan pengalaman relaksasi, wisata ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung yaitu rumaah payung sebagai tempat berteduh dan bersantai, tempat parkir yang luas, loket karcis serta kamar ganti dan kamar WC. Dengan berbagai sumber daya alam wisata yang dimiliki, keberadaan destinasi ini seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik dalam membuka lapangan pekerjaan maupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan berbeda, meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan wisata ini masih sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten tanpa keterlibatan langsung pemerintah desa dan masyarakat setempat. Akibatnya banyak peluang yang bisa dikembangkan justru terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang baik. Pemerintah kabupaten sebagai pengelola utama belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dalam hal pengelolaan maupun strategi pemasaran. Jika pengelolaan wisata ini melibatkan pemerintah desa dan masyarakat sekitar, wisata ini dapat berkembang lebih pesat. Partisipasi aktif masyarakat juga berpotensi menciptakan berbagai peluang ekonomi baru, seperti usaha kuliner, penyewaan perlengkapan wisata, serta layanan pemandu wisata.

Berikut Daya Tarik dan Keunikan di Destinasi Wisata Pemandian Air Panas

- a. Sumber air panas alami yang mengalir seperti sungai

Gambar 2.6 Sumber Mata Air Panas Alami



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Gambar di atas menunjukkan keindahan sumber mata air panas alami yang menjadi daya tarik utama dari Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di Desa Mengeruda. Dalam gambar tersebut, tampak kolam air panas yang jernih, mengalir menyerupai aliran sungai kecil dengan dasar yang dipenuhi bebatuan alami. Kejernihan air ini menambah daya tarik visual sekaligus memberikan kesan alami dan asri yang memikat para pengunjung. Mata air panas ini memancarkan air dengan suhu yang cukup stabil, berkisar antara 35 hingga 45 derajat Celsius. Suhu ini dianggap ideal untuk berendam, karena cukup hangat untuk menenangkan tubuh tanpa menimbulkan ketidaknyamanan akibat panas berlebih. Sensasi berendam di air hangat alami ini memberikan rasa nyaman dan relaksasi mendalam, sehingga banyak pengunjung yang memilih menghabiskan waktu cukup lama di dalam kolam untuk menikmati manfaatnya.

Lebih dari sekadar menawarkan kenyamanan, banyak masyarakat dan pengunjung yang mempercayai bahwa air panas ini mengandung mineral-mineral alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Mineral yang terkandung di dalamnya, seperti belerang, magnesium, dan kalsium, diyakini dapat membantu meredakan nyeri otot, mengurangi pegal-pegal, memperlancar peredaran darah, hingga meningkatkan relaksasi tubuh dan pikiran. Tidak sedikit pula yang mempercayai bahwa terapi berendam di air panas ini dapat mempercepat pemulihan dari beberapa jenis gangguan kulit ringan serta mengurangi stres. Keunikan dari mata air panas Desa Mengeruda ini terletak pada keberadaannya di tengah lingkungan alam yang masih sangat terjaga. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan suasana alam yang tenang, pengalaman berendam di sini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga menyajikan ketenangan mental yang sulit ditemukan di tempat lain. Suasana alami ini menjadi nilai tambah yang membuat wisatawan merasa lebih dekat dengan alam dan mampu melepaskan kepenatan akibat rutinitas harian. Dengan segala pesona dan manfaat yang ditawarkan, tidak mengherankan apabila Pemandian Air Panas Mengeruda menjadi salah satu kebanggaan Desa Mengeruda, sekaligus aset wisata alam yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk generasi mendatang.

b. Kolam alami dengan variasi suhu

Gambar 2.7 Kolam alami dengan variasi suhu



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Gambar diatas menunjukan keberagaman kolam air panas alami di Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Desa Mengeruda. Terlihat dengan jelas adanya beberapa kolam yang memiliki tingkat kedalaman dan suhu yang berbeda-beda, yang secara tidak langsung menunjukkan upaya adaptasi tempat wisata ini terhadap kebutuhan dan kenyamanan berbagai kalangan pengunjung. Pembagian kolam yang bervariasi ini menjadi daya tarik tersendiri, karena memberikan fleksibilitas bagi wisatawan dalam memilih pengalaman berendam yang sesuai dengan preferensi dan kondisi fisik mereka. Terdapat kolam-kolam yang lebih dangkal dengan suhu air yang cenderung lebih hangat namun tidak terlalu panas. Kolam-kolam ini sangat cocok digunakan oleh anak-anak, lansia, atau pengunjung yang hanya ingin merendam kaki untuk merasakan sensasi hangat dan relaksasi ringan tanpa harus berendam sepenuhnya.

Suasana di sekitar kolam dangkal ini pun umumnya lebih santai dan aman, menjadikannya tempat yang ideal untuk keluarga yang datang bersama anak-anak.

Sementara itu, untuk pengunjung dewasa yang menginginkan pengalaman berendam secara penuh, tersedia kolam yang lebih dalam dengan suhu air yang lebih tinggi. Kolam-kolam ini dirancang untuk memberikan efek relaksasi yang lebih maksimal, terutama bagi mereka yang ingin mengurangi kelelahan otot, mengatasi pegal-pegal, atau sekadar mencari ketenangan dari rutinitas harian. Perbedaan suhu ini memungkinkan pengunjung untuk menyesuaikan diri secara bertahap, sehingga pengalaman berendam menjadi lebih menyenangkan dan aman. Tidak hanya kedalaman dan suhu, karakteristik aliran air di setiap kolam juga turut menambah keunikan. Beberapa kolam memiliki bagian dengan aliran air yang lebih deras dan mengalir seperti sungai kecil, memberikan efek pijatan alami pada tubuh. Area ini sering menjadi favorit bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi seperti spa alam. Sebaliknya, kolam lain menawarkan aliran air yang tenang, menciptakan suasana damai yang cocok untuk meditasi, refleksi diri, atau sekadar menikmati kesunyian alam yang menenangkan.

c. Pemandangan alam yang masi asri

Gambar 2.8 Pemandangan alam yang masi asri



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Gambar di atas tidak hanya menunjukkan pesona air panasnya, tetapi juga menggambarkan keindahan alam sekitar yang menjadi pelengkap sempurna dari pengalaman berendam di Pemandian Air Panas Desa Mengeruda. Di sekeliling area pemandian, terlihat deretan pepohonan yang masih rimbun dan hijau, memberikan nuansa sejuk, teduh, dan alami. Pepohonan ini bukan hanya sebagai latar yang mempercantik suasana, tapi juga menciptakan kenyamanan bagi pengunjung karena mampu meredam panas matahari dan menjaga kesejukan udara di sekitar lokasi. Kesan asri dan alami sangat terasa saat menyusuri jalur setapak yang telah disediakan. Jalur ini mengarahkan pengunjung menyusuri area pemandian sambil menikmati panorama alam di sekitarnya—mulai dari suara gemericik air, kicauan

burung, hingga semilir angin yang menenangkan. Jalur tersebut sangat cocok bagi wisatawan yang ingin sekadar berjalan santai, menghirup udara segar, atau berfoto di tengah keindahan alam yang masih terjaga.

Keaslian dan kealamian lingkungan sekitar menjadi nilai tambah yang membuat pemandian ini tidak hanya cocok untuk melepas lelah secara fisik, tetapi juga sebagai tempat untuk menenangkan pikiran dan menyeimbangkan emosi. Bagi banyak orang, suasana seperti ini sangat langka, apalagi jika dibandingkan dengan hiruk pikuk kehidupan di kota. Tidak sedikit pengunjung yang datang bukan hanya untuk merasakan manfaat air panasnya, tetapi juga untuk menikmati suasana alamnya. Bahkan, beberapa wisatawan memilih datang di pagi hari hanya untuk berjalan-jalan menyusuri jalur setapak sambil menikmati kabut tipis yang masih menyelimuti pepohonan-pemandangan yang memberikan kesan damai dan menenangkan

5. Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda

Keberhasilan destinasi wisata tidak hanya dilihat dari daya tarik wisata, tetapi juga pada fasilitas pendukung. Fasilitas yang memadai, infrastruktur yang baik dan layanan yang ramah menjadi hal penting untuk meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Ada beberapa fasilitas yang tersedia di Destinasi Wisata Pemandian Air Panas yaitu jalan yang baik, area parkir, kamar mandi dan kamar WC, gazeboh, ruma payung, loket karcis dan lampu penerang jalan. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti, beberapa fasilitas masih membutuhkan perbaikan, seperti kondisi kamar mandi yang mulai rusak, gazeboh yang kurang dirawat, dan ada beberapa lampu jalan yang mati yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

a) Akses Jalan

Gambar 2.9 Akses Jalan Ke Wisata Pemandian Air Panas



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Akses jalan merupakan salah satu hal yang krusial yang sangat penting dalam menunjukan berbagai aspek, termasuk peningkatan ekonomi. Jalan yang baik dan mulus menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke suatu destinasi wisata. Maka dari itu, jalan adalah salah satu pertimbangan bagi para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata. Dengan kondisi jalan yang memadai, wisatawan akan lebih tertarik untuk datang ke tempat wisata, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor pariwisata serta perekonomian di daerah tersebut. Jalan yang menuju ke Destinasi Wisata Pemandian Air Pnaas suda aspal dan mulus, sehinga memberikan kemudahan bagi wisatawan yang berkujung ke tempat wisata tersebut.

b) Tempat Parkir

Gambar 2.10 Tempat Parkir Di Wisata Pemandian Air Panas



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Selain jalan, tempat parkir merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan destinasi wisata. Tempat parkir di Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda ini sudah cukup memadai untuk menampung kendaraan para pengunjung, baik yang datang dengan sepeda motor, mobil pribadi maupun bus rombongan. Lokasi parkir tidak jauh dari pintu masuk utama, sehingga memudahkan wisatawan untuk mengakses tempat wisata tanpa harus berjalan terlalu jauh. Meskipun area parkirnya cukup luas, namun belum ada petugas yang mengelola tempat parkir secara khusus, sehingga pengunjung biasanya memarkir kendaraan mereka secara mandiri.

c) Locket Karcis

Gambar 2.11 Locket Karcis



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Locket karcis merupakan fasilitas penting dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk di kawasan Pemandian Air Panas Mengeruda. Locket ini berfungsi sebagai tempat bagi pengunjung untuk membeli tiket masuk sebelum memasuki area wisata. Locket ini terletak di dekat pintu masuk utama, sehingga mudah diakses oleh setiap wisatawan yang datang. Bangunan loketnya sendiri cukup sederhana sebuah pos kecil dengan jendela tempat petugas melayani pengunjung satu per satu. Meski tampilannya tidak mewah, loket ini menjalankan perannya dengan cukup baik. Pengunjung yang datang akan diarahkan untuk melakukan pembayaran secara tunai, lalu diberikan karcis sebagai bukti sah bahwa mereka telah membayar dan berhak menikmati fasilitas yang ada di dalam kawasan wisata. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan meningkatnya harapan wisatawan terhadap kemudahan layanan, sistem di loket ini masih tergolong konvensional. Belum tersedia pilihan pembayaran digital seperti QRIS, kartu debit, atau dompet digital. Artinya, setiap pengunjung perlu menyiapkan uang tunai terlebih dahulu sebelum masuk. Hal ini terkadang menjadi kendala, terutama bagi wisatawan dari luar daerah yang terbiasa dengan transaksi non-tunai atau tidak sempat membawa uang pas.

d) Rumah Payung

Gambar 2.12 Rumah Payung



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Di kawasan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda, selain kolam-kolam air panas yang menenangkan, pengelola juga menyediakan fasilitas rumah payung sebagai tempat berteduh bagi para wisatawan. Rumah payung ini berbentuk struktur sederhana namun fungsional, terdiri dari tiang-tiang penyangga dengan atap lebar yang menyerupai payung besar. Desainnya yang terbuka membuat sirkulasi udara tetap terasa sejuk, sehingga sangat nyaman digunakan untuk beristirahat. Fasilitas ini menjadi pilihan ideal bagi pengunjung yang ingin sejenak bersantai setelah berendam di air panas. Banyak wisatawan menggunakan rumah payung ini untuk melepas lelah, menunggu pakaian kering, atau sekadar duduk santai menikmati suasana alam sekitar. Dengan keberadaan rumah payung ini, wisatawan tidak perlu khawatir kepanasan saat matahari sedang terik atau kehujanan saat cuaca berubah.

Biasanya, di bawah rumah payung juga tersedia beberapa bangku panjang atau meja sederhana yang memungkinkan wisatawan berkumpul bersama keluarga atau teman. Anak-anak bisa bermain di sekitar, sementara orang tua duduk menikmati pemandangan sambil berbincang santai. Suasana di area rumah payung ini cenderung hidup, tetapi tetap nyaman dan tidak mengganggu ketenangan alami

kawasan pemandian. Kehadiran rumah payung ini meskipun sederhana, sangat penting dalam meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, fasilitas ini juga memperlihatkan perhatian pengelola terhadap kebutuhan wisatawan akan ruang-ruang transisi-tempat di mana mereka bisa menikmati waktu luang tanpa harus langsung kembali ke kendaraan atau meninggalkan area wisata terlalu cepat.

e) Gazebo Besar

Gambar 2.13 Gazeboh Besar



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Di kawasan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda tersedia juga sebuah gazeboh besar yang menjadi salah satu fasilitas bagi pengunjung. Gazeboh ini berfungsi sebagai tempat istirahat, berkumpul, dan berteduh dengan ukuran yang cukup luas, gazebo ini mampu menampung banyak orang sekaligus, sehingga sering dimanfaatkan oleh rombongan wisatawan, keluarga, maupun kelompok yang ingin bersantai bersama. Selain sebagai tempat istirahat, gazebo besar ini sering digunakan untuk makan bersama, atau sekadar menikmati suasana alam sekitar. Dulu gazebo ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa mengeruda sebagai tempat untuk berjualan makanan, minuman, dan kebutuhan wisatawan. Keberadaan pedagang di gazebo ini memberikan manfaat bagi pengunjung yang ingin menikmati kuliner lokal setelah berendam, sekaligus menjadi sumber penghasilan

bagi masyarakat desa mengeruda. Namun sekarang setelah pemerintah kabupaten mengambil alih wisata ini masyarakat tidak di ijin untuk berjualan di gazebo ini. Sejak tidak lagi digunakan sebagai tempat berjualan oleh masyarakat setempat dan hanya difungsikan sebagai tempat istirahat bagi pengunjung, beberapa gazebo tampak mengalami kerusakan, seperti atap yang mulai bocor, tiang yang lapuk, serta lantai yang kotor dan tidak terawat. Minimnya perawatan membuat gazebo yang seharusnya menjadi fasilitas nyaman bagi wisatawan justru terlihat kurang menarik dan kurang optimal penggunaannya.

f) Kamar Mandi

Gambar 2.14 Kamar Mandi



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Kamar mandi merupakan salah satu fasilitas penting untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Kamar mandi digunakan untuk pengunjung untuk membas tubuh sebelum dan sesudah berendam. Fasilitas ini tersebar di beberapa titik di sekitar kawasan wisata pemandian air panas mengeruda, terutama di dekat area pemandian utama agar mudah diakses oleh wisatawan. Meskipun keberadaannya sangat penting, kondisi kamar mandi di tempat ini masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal kebersihan dan perawatan. Beberapa kamar mandi terlihat mulai mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak, aliran air yang tidak selalu lancar, serta kebersihan yang kurang terjaga, terutama saat kunjungan wisata sedang ramai. Hal ini membuat sebagian pengunjung merasa kurang nyaman saat menggunakannya.

g) Lampu Penerang Jalan

Gambar 2.15 Lampu Penerang Jalan



Sumber: Dokumen Lapangan Penelitian 2024

Lampu penerang jalan merupakan fasilitas yang penting, agar bisa memberikan penerangan bagi pengunjung yang datang pada sore hari hingga malam hari. Lampu- lampu ini dipasang di sepanjang jalur menuju area pemandian serta di beberapa titik strategis di dalam kawasan wisata untuk membantu pengunjung melihat jalan dengan jelas saat kondisi mulai gelap. Namun, kurangnya penjagaan dan pengawasan terhadap fasilitas ini menyebabkan banyak lampu yang mengalami kerusakan. Selain faktor alam dan kurangnya perawatan, beberapa lampu rusak akibat ulah anak-anak nakal yang tidak terawasi. Hal ini semakin diperparah oleh minimnya petugas yang berjaga untuk mengawasi dan mencegah tindakan yang dapat merusak fasilitas umum.

6. Aksesibilitas dan Jam Operasional

Dalam pariwisata aksesibilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dan mempengaruhi minat para wisatawan untuk berkunjung ke Destinasi Wisata. Aksesibilitas dapat diukur dengan jarak yang ditempuh, keadaan jalan dan transportasi apa yang digunakan pengunjung. Untuk keadaan jalan menuju

Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda sudah baik dan beraspal, secara umum lokasi destinasi wisata ini cukup mudah dijangkau karena terhubung dengan jalan utama yang mengarah ke kawasan wisata. Destinasi Wisata Pemandian Air Panas ini terletak di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, jarak dari kota Bajawa kurang lebih 23 km dengan waktu tempuh 30-40 menit. Destinasi wisata pemandian air panas ini dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 WITA hingga 18.00 WITA. Harga tiket masuk untuk wisatawan lokal adalah Rp10.000 per orang, dengan biaya parkir Rp5.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp3.000 untuk kendaraan roda dua. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara, tiket masuknya seharga Rp20.000 per orang.

BAB III

**RELASI KUASA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH
DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WISATA
PEMANDIAN AIR PANAS MENERUDA**

Pada bab ini peneliti akan menyajiakan hasil temuan peneliti selama di lapangan, yaitu terkait “Bagaimana Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda Dan Masyarakat). Peneliti akan menguraikan secara mendalam tentang interaksi dan dinamika kuasa yang terjadi antara ketiga pihak ini dalam pengelolaan destinasi wisata. Hasil penelitian ini juga didasari pada fokus penelitian dan data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah memperoleh data dari narasumber yang relevan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, data tersebut dianalisis dengan tujuan untuk merangkum informasi sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas di Desa Mengeruda Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menguraikan lebih lanjut tentang relasi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah, peran pemerintah sebagai regulator sekaligus proteksi bagi masyarakat, serta hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolan wisata pemandian air panas mengeruda.

A. Relasi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintah Dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda.

Dalam sistem tata kelola, hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa memiliki peran yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan tata kelola, termasuk pengelolaan destinasi wisata. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam perencanaan strategis, koordinasi, dan pendanaan untuk pengembangan sektor pariwisata, sedangkan pemerintah desa memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaan di tingkat lokal, seperti memanfaatkan sumber daya dan mendorong masyarakat setempat untuk berkembang. Diharapkan kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang dapat menguntungkan semua pihak. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Ngada memiliki kendali penuh atas destinasi wisata pemandian air panas di Desa Mengeruda. Destinasi wisata tersebut dikelola oleh pemerintah kabupaten tanpa melibatkan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa dan masyarakat setempat tidak memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata ini karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Keadaan ini menunjukkan adanya hubungan pemerintahan yang tidak seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana pemerintah kabupaten bertindak sepihak tanpa melibatkan pemerintah desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Dominikus Oskar Gae, Kepala Desa Mengeruda yang mengatakan bahwa:

“Awalnya destinasi wisata pemandian air panas ini dikelola oleh pemerintah desa. Namun seiring berjalanya waktu, pemerintah kabupaten secara sepihak mengambil alih pengelolaan tanpa melalui diskusi atau musyawarah dengan pihak desa dan sampai sekarang pengelolaan wisata ini suda berjalan dibawa kendali pemerintah kabupaten tanpa adanya persetujuan dari pemerintah desa.” (Rabu, 08 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, diketahui bahwa destinasi wisata pemandian air panas di Desa Mengeruda pada awalnya merupakan potensi lokal yang dikelola secara langsung oleh pemerintah desa. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa bertanggung jawab penuh atas berbagai aspek, mulai dari pengelolaan fasilitas, pengaturan parkir, penarikan tiket masuk, hingga pengangkatan petugas kebersihan di area wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sentral dalam mengelola potensi wisata yang ada di wilayahnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan besar dalam pengelolaan objek wisata ini. Pada masa kepemimpinan mantan Bupati Ngada, Marinus Sae, pengelolaan pemandian air panas Mengeruda dialihkan kepada pihak swasta melalui mekanisme kontrak kerja sama. Setelah masa kontrak tersebut berakhir, pemerintah kabupaten tiba-tiba datang ke Desa Mengeruda untuk meminta persetujuan agar pengelolaan objek wisata tersebut selanjutnya diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Akan tetapi, permintaan ini tidak mendapat persetujuan dari pemerintah desa. Meskipun tidak ada kesepakatan atau persetujuan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten tetap melanjutkan proses pengambilalihan. Tindakan ini dilakukan secara sepihak dan tanpa melalui mekanisme musyawarah atau dialog bersama, yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah kabupaten berdalih bahwa karena mereka merupakan otoritas pemerintahan tertinggi di wilayah tersebut, maka mereka merasa memiliki kewenangan penuh untuk menguasai dan mengelola aset wisata yang ada di desa, termasuk pemandian air panas Mengeruda. Situasi ini menimbulkan persoalan serius, karena sejak saat itu pengelolaan wisata tidak lagi melibatkan pemerintah desa maupun masyarakat lokal sebagai pemilik potensi. Pemerintah desa yang sebelumnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan kini sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, partisipasi desa sangat penting dalam menjaga

keberlanjutan, kearifan lokal, serta distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Pengambilalihan sepihak ini juga berpotensi memicu konflik kewenangan, ketidakpuasan masyarakat, dan hilangnya rasa memiliki terhadap aset wisata yang berada di wilayah mereka sendiri.

Berdasarkan informasi yang ditemukan peneliti di destinasi wisata Pemandian Air Panas Mengeruda, diketahui bahwa seluruh aspek pengelolaan kini berada di bawah kendali penuh Pemerintah Kabupaten Ngada. Pemerintah kabupaten mengambil alih pengelolaan dengan alasan bahwa objek wisata ini merupakan aset milik pemerintah kabupaten. Hal ini mencakup pengelolaan fasilitas hingga penentuan tenaga kerja. Penjelasan ini disampaikan secara langsung oleh Oktavianus Botha Djawa, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, yang mengatakan bahwa:

“Destinasi wisata ini merupakan aset daerah, jadi pemerintah kabupaten yang mengelolanya. Saat ini, pemerintah kabupaten sepenuhnya bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan, termasuk perekrutan tenaga kerja, pemeliharaan kawasan, penjualan tiket, dan fasilitas sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten.” (Senin, 20 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen, dapat diketahui bahwa pengelolaan destinasi wisata pemandian air panas di Desa Mengeruda sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Kabupaten Ngada. Pemerintah kabupaten beralasan bahwa kawasan wisata ini merupakan aset daerah, sehingga pengelolaannya dilakukan secara langsung tanpa melibatkan pemerintah desa, baik dalam pengambilan keputusan strategis maupun dalam operasional sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat justru terpinggirkan dalam pengelolaan potensi wisata yang berada di wilayah administratifnya sendiri. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi di lapangan, yang menunjukan bahwa pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, perekrutan tenaga kerja, maupun pengelolaan fasilitas wisata. Tidak tersedia pula ruang formal bagi pemerintah desa untuk menyampaikan masukan atau

aspirasi terkait pengembangan kawasan wisata tersebut. Padahal, secara kelembagaan, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan bahwa pengelolaan aset desa atau daerah dapat memberikan manfaat langsung bagi warga desa. Sementara itu, dari sisi dokumen, tidak ditemukan adanya kebijakan atau dokumen formal yang mengatur pembagian kewenangan atau skema kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pengelolaan destinasi wisata ini.

Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan dalam tata kelola yang idealnya bersifat *multi-level governance*. Dalam semangat otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya pemerintah desa memiliki ruang untuk berperan, atau setidaknya terlibat dalam pengambilan keputusan atas sumber daya yang berada di wilayahnya. Apalagi jika secara geografis dan sosial, dampak pengelolaan wisata tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat desa. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah desa berada dalam posisi yang dilemahkan-sekadar menjadi penonton dalam pengelolaan aset yang seharusnya bisa menjadi instrumen penting dalam pembangunan lokal. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk membuka ruang koordinasi dan membangun kemitraan sejajar dengan pemerintah desa, agar pengelolaan destinasi wisata tidak hanya bersifat administratif dan teknokratis, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Di sisi lain, pemerintah desa juga perlu lebih proaktif menyuarakan peran dan kepentingannya, baik melalui forum musyawarah, jalur komunikasi antar-pemerintah, maupun melalui dokumen perencanaan desa yang secara eksplisit mencantumkan peran strategis desa dalam pengembangan pariwisata. Namun, berdasarkan informasi yang ditemukan peneliti di destinasi wisata Pemandian Air Panas, meskipun wisata ini dikelola oleh pemerintah kabupaten, mereka tetap memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk terlibat dalam pengelolaan wisata ini.

Hal ini dijelaskan oleh Theodosius d Nono, Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten tetap memberikan kesempatan bagi desa untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata ini, dengan mengizinkan pembangunan dan pengelolaan fasilitas tambahan seperti MCK, area parkir, dan warung makan. Hasil dari pengelolaan fasilitas ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa). Namun sampe saat ini, pihak desa belum menjalankan kesempatan tersebut.” (Senin, 20 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa meskipun pemerintah kabupaten memberi kesempatan untuk pemerintah desa terlibat dalam pengelolaan wisata ini namun realitanya, pemerintah desa masi menghadapi banyak kendala dalam memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Yohanes A. Ngoe Leo Sekertaris Desa Mengeruda yang mengungkapkan hambatan yang mereka alami bahwa:

“Keterbatasan dana dan minimnya informasi mengenai tata cara pengelolaan destinasi wisata membuat kami tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada. Desa tidak memiliki sumber dana yang memadai untuk pembangunan fasilitas tambahan, yang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Selain itu, ketidak jelasan mengenai peran yang dapat diambil desa dalam pengelolaan destinasi wisata ini semakin mempersulit desa untuk terlibat dalam pengelolaan wisata.” (Rabu 08 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terlihat jelas bahwa pemerintah desa mengalami kebingungan dan keterbatasan dalam mengambil peran dalam pengelolaan destinasi wisata pemandian air panas. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan dana dan kurangnya informasi serta kejelasan terkait tata kelola wisata tersebut. Pemerintah desa merasa tidak memiliki ruang yang jelas untuk berkontribusi, karena hingga saat ini belum ada mekanisme yang melibatkan mereka secara langsung dalam pengambilan keputusan atau perencanaan pengelolaan. Dalam wawancara tersebut, dinyatakan bahwa desa bahkan tidak mengetahui peran apa yang seharusnya mereka ambil. Tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten sebagai pengelola utama dengan pemerintah desa membuat peluang yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi, terlihat bahwa tidak terdapat papan informasi atau media komunikasi

resmi yang menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa terkait pengelolaan wisata pemandian air panas. Kantor desa tidak memiliki dokumen atau arsip tentang rencana pengembangan wisata, dan tidak ada petugas khusus di tingkat desa yang bertanggung jawab atas sektor pariwisata. Selain itu, selama kunjungan ke lokasi wisata, tidak terlihat kehadiran aparatur desa dalam kegiatan operasional, yang menandakan minimnya pelibatan mereka. Di sisi lain, pemerintah daerah tampak menjalankan pengelolaan secara terpusat. Petugas di lapangan yang mengelola tiket, kebersihan, dan pengawasan berasal dari pihak kabupaten, tanpa identifikasi yang menunjukkan kerja sama dengan pihak desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan secara top-down, tanpa melibatkan struktur pemerintahan lokal. Akibatnya, potensi kontribusi desa-baik dalam bentuk kearifan lokal, tenaga kerja, maupun pemanfaatan pendapatan asli desa- belum tergarap secara optimal.

Permasalahan ini semakin diperparah dengan minimnya komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Pemerintah desa sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai kebijakan ataupun rencana pengelolaan dan pengembangan wisata yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan dengan Dominikus Oskar Gae, Kepala Desa Mengeruda yang mengatakan bahwa:

“Selama ini komunikasi yang terjadi sangat minim. Kami dari pemerintah desa sering tidak mendapatkan informasi langsung tentang kebijakan atau rencana pengembangan wisata dari pemerintah kabupaten. Ketika ada kegiatan yang diselenggarakan di lokasi wisata, pemerintah desa sering kali hanya mengetahui dari pihak lain atau setelah acara berlangsung. Kami sudah beberapa kali mencoba meminta pertemuan dengan pemerintah kabupaten, tetapi respon dari mereka kurang jelas.”(Rabu, 08 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam hal pengelolaan Serta pengembangan destinasi wisata masih sangat lemah. Pemerintah desa

menyampaikan kekecewaannya karena selama ini tidak mendapatkan informasi langsung mengenai kebijakan maupun rencana kegiatan dari pemerintah kabupaten. Bahkan, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata sering kali diketahui oleh pihak desa justru dari pihak lain atau setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara dua level pemerintahan tersebut. Pemerintah desa merasa tidak dilibatkan, padahal lokasi wisata berada di wilayah administrasi mereka. Upaya untuk menjalin komunikasi pun telah dilakukan, seperti permintaan pertemuan dengan pihak kabupaten, namun respons yang diberikan dianggap tidak jelas dan tidak ditindaklanjuti secara konkret. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah desa hanya sebagai penonton dalam pembangunan di wilayahnya sendiri.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan wisata di desa berjalan tanpa adanya pelibatan langsung dari pemerintah desa, baik dalam bentuk penugasan, pembagian peran, maupun pengawasan. Bahkan ketika terdapat acara besar yang diselenggarakan, keterlibatan pemerintah desa terbatas hanya pada penerimaan informasi dari pihak luar atau kehadiran sebagai tamu undangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa komunikasi antara pemerintah kabupaten dan desa tidak dibangun dalam kerangka kemitraan, melainkan bersifat sepihak dan top-down. Lebih lanjut, hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi seperti surat keputusan dan agenda kegiatan yang dikeluarkan oleh dinas terkait di tingkat kabupaten juga menguatkan temuan tersebut. Tidak ditemukan adanya bukti keterlibatan formal dari pemerintah desa dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Tidak terdapat undangan rapat, berita acara koordinasi, maupun notulen yang menunjukkan adanya partisipasi pemerintah desa. Seluruh keputusan penting tampaknya diambil di tingkat kabupaten dan langsung diterapkan di lapangan tanpa melalui proses koordinasi yang melibatkan unsur pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang dilakukan dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah dalam mengelola Destinasi Wisata isata Pemandian Air Panas Mengeruda masih belum harmonis dan cenderung didominasi oleh pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan ketimpangan kewenangan dan kurangnya koordinasi, di mana pemerintah desa yang seharusnya menjadi pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di wilayahnya merasa terabaikan. Selain itu, tidak adanya skema kolaborasi atau kebijakan formal yang mengatur pembagian peran antara kedua pihak membuat pengelolaan wisata cenderung berjalan secara top-down dari tingkat kabupaten, yang berpotensi merugikan masyarakat desa karena mereka tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menyusun mekanisme kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa dalam pengelolaan destinasi wisata ini, sementara pemerintah desa juga perlu lebih proaktif dalam menyuarakan peran dan kepentingannya untuk memastikan pengelolaan wisata dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat local

B. Peran Pemerintah Sebagai Regulating dan Proteksi Bagi Masyarakat Desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Provinsi NTT.

Dalam pengelolaan destinasi wisata dan sumber daya alam, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan perlindungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk destinasi wisata, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, sebagai perlindungan, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang ada bekerja secara langsung untuk masyarakat dan menghindari dampak negatif. Namun, dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di Desa Mengeruda, belum ada peraturan yang jelas tentang bagaimana pemerintah desa dan masyarakat terlibat dalam pengelolaan wisata Pemandian Air Panas Desa Mengeruda, yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah kabupaten. Tidak ada kebijakan yang melindungi hak-hak pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengelola wisata ini. Akibatnya, masyarakat setempat dan pemerintah desa Mengeruda tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan terkait Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Mengeruda. Mereka hanya dapat mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten tanpa ada ruang untuk berpartisipasi lebih lanjut. Hal ini sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Yohanes Wilhelmus, masyarakat desa Mengeruda yang mengatakan bahwa:

“Sebelum pemerintah kabupaten mengambil alih wisata ini, masyarakat Desa Mengeruda lebih leluasa dalam mengelola objek wisata pemandian air panas ini. Namun, saat ini semua pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten, dan kami masyarakat Desa Mengeruda hanya bisa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.” (Rabu, 15 Januari 2025)

Dari hasil wawancara diatas, terlihat jelas bahwa dulunya masyarakat Desa Mengeruda punya peran besar dalam mengelola wisata pemandian air panas.

Mereka yang mengurus tiket masuk, menjaga kebersihan, bahkan membuka usaha seperti warung atau tempat oleh-oleh di dalam kawasan wisata. Masyarakat merasa punya andil dan tanggung jawab terhadap tempat wisata itu karena mereka terlibat langsung dalam pengelolaannya. Selain itu, dampaknya juga terasa langsung bagi ekonomi warga -banyak yang bisa mendapat penghasilan dari aktivitas di dalam area wisata. Tapi sekarang situasinya berubah. Pemerintah kabupaten mengambil alih sepenuhnya pengelolaan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat hanya diberi tahu bahwa mulai saat itu semua aturan akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten, termasuk aturan baru yang melarang masyarakat membuka usaha di dalam kawasan wisata. Mereka hanya diperbolehkan berjualan di luar area, yang jelas mengurangi peluang mereka untuk mendapat pembeli. Perubahan ini membuat warga merasa terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Dulu mereka bisa ikut membangun dan merawat tempat wisata ini, tapi sekarang mereka hanya jadi penonton. Padahal, dalam pengelolaan wisata yang baik, seharusnya masyarakat lokal dilibatkan karena merekalah yang paling tahu kondisi lapangan dan punya semangat menjaga tempat itu tetap lestari. Kalau terus dibiarkan seperti ini, bukan hanya penghasilan masyarakat yang berkurang, tapi juga rasa memiliki dan kepedulian terhadap wisata ini bisa hilang. Pemerintah seharusnya tidak hanya memikirkan pengelolaan dari sisi administrasi dan keuntungan, tapi juga bagaimana caranya agar masyarakat tetap dilibatkan dan bisa merasakan manfaat yang adil dari keberadaan tempat wisata di desa mereka sendiri.

Peneliti juga menemukan informasi bahwa setelah pemerintah kabupaten mengambil alih pengelolaan destinasi wisata, tidak ada regulasi yang jelas yang mengatur masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata ini. Hal ini disampaikan oleh Maria Moi, salah satu masyarakat desa mengeruda yang mengatakan bahwa:

"Sampai saat ini, belum ada regulasi yang jelas yang memberikan kami kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas. Segala kebijakan dan keputusan berkaitan dengan pengelolaan wisata sepenuhnya dibuat oleh pemerintah kabupaten tanpa melibatkan, kami masyarakat Desa Mengeruda." (Rabu, 15 Januari 2025).

Dari kutipan wawancara tersebut, kita bisa melihat dengan jelas bahwa masyarakat Desa Mengeruda merasa tidak diberi ruang untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas. Sampai sekarang, belum ada aturan atau kebijakan yang memberi kesempatan kepada warga desa untuk berpartisipasi, apalagi ikut mengambil keputusan. Semua diatur sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten. Masyarakat hanya bisa menonton dan menerima apa pun keputusan yang sudah jadi, tanpa bisa memberi masukan atau keberatan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tampaknya lebih fokus pada keuntungan ekonomi semata. Wisata ini jelas menghasilkan uang -dari tiket masuk, parkir, dan fasilitas lainnya. Tapi sayangnya, yang merasakan manfaat paling besar adalah pemerintah, bukan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Padahal, merekalah yang selama ini menjaga, merawat, dan dulu bahkan ikut mengembangkan tempat ini. Kalau dilihat dari kacamata keadilan, tentu ini tidak adil. Masyarakat lokal tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber pendapatan, tapi juga kehilangan hak untuk menentukan masa depan tempat wisata yang berada di wilayah mereka sendiri. Mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan, tidak diajak diskusi. Temuan ini juga tercermin dalam hasil observasi di lapangan dan telaah dokumen yang ada, di mana masyarakat desa tidak mendapatkan akses informasi yang memadai mengenai kebijakan yang diterapkan,

Bukan hanya masyarakat desa mengeruda saja yang tidak dilibatkan, Pemerintah Desa Mengeruda yang seharusnya memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah juga tidak dilibatkan. Sebagai lembaga yang memahami kondisi dan kebutuhan lokal, sudah seharusnya pemerintah desa dilibatkan dalam setiap kebijakan terkait pariwisata. Namun kenyataan yang ada berbeda, mereka

tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan pariwisata. Hal ini diungkapkan oleh Yohanes A. Ngoe Leo, Sekretaris Desa Mengeruda yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten membuat semua keputusan terkait pengelolaan wisata pemandian air panas tanpa melibatkan kami dari pihak desa. Selama ini kami tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat atau dilibatkan dalam diskusi yang membahas tentang pengelolaan destinasi wisata pemandian air panas ini. Semua keputusan diambil oleh kabupaten sendiri, tanpa mendengar masukan atau mempertimbangkan kepentingan kami yang berada di sekitar kawasan wisata. Padahal, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendukung pengelolaan wisata berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.”(Rabu, 08 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terlihat jelas bahwa seluruh kendali pengelolaan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda kini sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten. Sebagai otoritas yang lebih tinggi, pemerintah kabupaten mengambil alih semua keputusan terkait destinasi wisata ini tanpa memberikan ruang partisipasi bagi Pemerintah Desa. Padahal, sejak awal, justru pemerintah desa yang menggagas dan mulai mengelola potensi wisata tersebut. Ironisnya, kini mereka bahkan tidak lagi dilibatkan dalam rapat, diskusi, maupun proses pengambilan keputusan apa pun terkait pengelolaan kawasan wisata tersebut. Situasi ini menimbulkan ketimpangan yang merugikan masyarakat desa.

Pemerintah desa seharusnya menjadi mitra strategis dalam pengelolaan wisata, karena merekalah yang paling memahami kondisi lokal, kebutuhan masyarakat, serta potensi yang dimiliki desa. Keterlibatan pemerintah desa juga sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan pengelolaan wisata secara berkelanjutan. Ketika desa tidak dilibatkan, arah pengelolaan wisata bisa saja tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga sekitar, bahkan berisiko menimbulkan konflik sosial maupun ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Lebih jauh lagi, tanpa adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa, potensi wisata yang ada tidak akan bisa dikembangkan secara optimal.

Pemerintah desa memiliki peran vital dalam menjembatani komunikasi dengan masyarakat, mendukung promosi lokal, hingga menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan wisata. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah kabupaten tidak hanya memandang pemerintah desa sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra sejajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengelolaan wisata yang berada di wilayahnya.

Temuan peneliti di lapangan juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini lebih menekankan pada pengelolaan kawasan wisata secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten. Seluruh fasilitas utama, seperti loket tiket, area parkir, dan infrastruktur wisata, dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten. Namun, tidak terdapat regulasi khusus yang mengatur peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa Mengeruda dalam pengelolaan destinasi wisata Pemandian Air Panas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Bety, pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, yang menegaskan bahwa:

"Saat ini regulasi yang ada lebih kepada pembangunan wisata secara keseluruhan oleh pemerintah kabupaten. Sementara itu, untuk masyarakat dan pemerintah desa memang belum ada regulasi khusus yang mengatur hak dan peran mereka untuk terlibat dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas ini. Namun demikian, kami tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Mengeruda untuk membuka usaha di luar kawasan wisata." (Senin, 20 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa tidak ada regulasi yang mengatur keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata pemandian air panas ini. pemerintah kabupaten hanya memberi kesempatan untuk masyarakat lokal untuk berjualan diluar kawasan wisata tanpa dukungan yang memadai seperti pelatihan usaha, pembinaan kualitas produk, akses modal, atau perlindungan hukum dari pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, masyarakat lokal dibiarkan berjalan sendiri tanpa panduan atau dukungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam konteks pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini juga di sampaikan oleh Teresia Deku masyarakat yang berjualan di sekitaran wisata yang mengatakan bahwa:

"Kami memang diperbolehkan berjualan di sekitar kawasan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas, tapi sampai sekarang belum ada aturan yang jelas yang melindungi usaha kami. Tidak ada bantuan dari pemerintah kabupaten, baik itu dalam bentuk modal, pelatihan, atau fasilitas pendukung. Kami hanya diberi ruang untuk mencari nafkah, tapi tidak ada kepastian hukum atas keberadaan kami di sini." (Jumat, 17 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa masyarakat lokal hanya diberikan kesempatan untuk membuka usaha di sekitar kawasan Wisata Pemandian Air Panas tanpa adanya payung hukum yang jelas maupun dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun secara fisik mereka diperbolehkan berada di kawasan wisata tersebut untuk mencari nafkah, namun tidak ada kebijakan resmi yang mengatur atau menjamin keberlangsungan usaha mereka. Selain itu, tidak ada bantuan dari pemerintah daerah berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat Desa Mengeruda hanya sebagai pelengkap kegiatan pariwisata, bukan sebagai bagian yang terlibat aktif dalam proses pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang memperhatikan dan tidak berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat setempat. Karena tidak adanya regulasi dan dukungan yang jelas, masyarakat menjadi rentan terhadap ketidakpastian dan kehilangan hak atas ruang usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara aktif agar manfaat sektor pariwisata dapat dirasakan secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang dilakukan terhadap para informan, dapat disimpulkan bahwa relasi antara pemerintah sebagai regulator dan pelindung masyarakat Desa Mengeruda dalam pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Ngada cenderung menjalankan peran pengendalian secara dominan,

sementara fungsi perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal belum dijalankan secara optimal. Dalam pelaksanaannya, fungsi regulasi oleh pemerintah kabupaten bersifat terpusat dan eksklusif, tanpa melibatkan masyarakat maupun Pemerintah Desa Mengeruda sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan. Ketidakterlibatan ini mencerminkan minimnya ruang partisipasi masyarakat desa dalam menentukan arah dan kebijakan pengelolaan wisata yang berada di wilayah mereka sendiri. Selain itu, fungsi proteksi pemerintah terhadap masyarakat lokal juga belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya regulasi khusus, dukungan usaha, maupun kepastian hukum yang dapat menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Masyarakat hanya diberikan ruang terbatas untuk berjualan di luar kawasan wisata, tanpa adanya pembinaan, fasilitasi, atau dukungan dari pemerintah. Pemerintah desa pun tidak dilibatkan secara aktif sebagai penghubung maupun pelaksana pembangunan lokal. Relasi yang timpang ini mencerminkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dan pelindung belum dijalankan secara adil dan inklusif. Ketidakseimbangan ini berpotensi mengikis rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata, yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

C. Hubungan Timbal Balik Antara Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Dan Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Air Panas Mengeruda.

Hubungan timbal balik dalam pengelolaan destinasi wisata antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Masing-masing pihak memiliki peran, kepentingan, dan tanggung jawab yang saling terkait, sehingga diperlukan kerja sama yang baik agar pengelolaan destinasi wisata berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Namun pada kenyataannya, dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di Desa Mengeruda terdapat ketidakseimbangan hubungan antara Pemerintah Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda dan masyarakat. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh dalam mengelola destinasi wisata ini tanpa melibatkan Pemerintah Desa Mengeruda dan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan fasilitas. Pemerintah kabupaten mengatur semua aspek operasional pariwisata, termasuk perekrutan tenaga kerja dan pemeliharaan fasilitas, sementara masyarakat setempat hanya diperbolehkan berjualan di luar kawasan wisata, tanpa kontrol atas pengelolaan atau pendapatan yang dihasilkan. Semua keputusan mengenai biaya masuk, pengelolaan, dan alokasi pendapatan diambil sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah desa tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengelola destinasi wisata yang berada di wilayah mereka sendiri. Hubungan timbal balik antara ketiga pihak ini belum terjalin secara optimal, karena masih didominasi oleh pemerintah kabupaten tanpa mekanisme kolaborasi yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat secara aktif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Dominikus Oskar Gae, Kepala Desa Mengeruda yang mengatakan bahwa:

“Selama ini pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di wilayah kami sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ngada, mulai dari pengelolaan fasilitas, perekrutan tenaga kerja, hingga pengelolaan keuangan, kami dari Pemerintah Desa Mengeruda tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan wisata ini. Sampai saat ini, desa tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari keberadaan wisata ini, karena seluruh pendapatan langsung masuk ke pemerintah kabupaten tanpa ada pembagian untuk desa.”(Rabu, 08 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada bentuk dukungan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Ngada dengan Pemerintah Desa Mengeruda. Pemerintah kabupaten lebih berperan sebagai pengendali utama tanpa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan maupun menikmati hasilnya. Sebaliknya, pemerintah desa Mengeruda juga tidak memiliki kewenangan atau akses yang cukup untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas ini. Hal ini mencerminkan hubungan yang cenderung satu arah, di mana Pemerintah Kabupaten Ngada mendapatkan keuntungan penuh, sementara Pemerintah Desa Mengeruda yang mempunyai potensi wisata ini hanya berperan sebagai pihak pasif tanpa dukungan yang memadai. Ketimpangan ini tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Desa Mengeruda tetapi juga oleh masyarakat setempat. Masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan wisata mengalami keterbatasan dalam mengakses manfaat ekonomi dari keberadaan destinasi yang berada di wilayah mereka sendiri. Hal ini disampaikan oleh Mersiana Mau masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan wisata, yang mengatakan bahwa:

“Saat ini, kami hanya diizinkan untuk berjualan di luar kawasan wisata dan tidak diizinkan untuk masuk ke dalam area Pemandian Air Panas. Kondisi ini membuat pendapatan kami tidak menentu karena sangat bergantung pada jumlah pengunjung yang datang setiap hari. Di sisi lain, pemerintah kabupaten menetapkan berbagai aturan bagi kami sebagai pelaku usaha lokal, namun tidak disertai dengan dukungan atau penyediaan fasilitas yang dapat membantu meningkatkan penghasilan kami. Hal ini yang menjadi kendala bagi kami untuk berkembang. Padahal, sebagai warga lokal yang tinggal di sekitar kawasan wisata, kami seharusnya diberi kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan wisata dan memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.”(Jumat, 17 Januari 2025)

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa masyarakat Desa Mengeruda merasa kurang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air panas ini atau menikmati manfaat ekonomi yang lebih adil. Minimnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa mengindikasikan bahwa hubungan timbal balik antara ketiga pihak ini masih belum optimal. Pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas saat ini lebih bersifat satu arah, di mana pemerintah kabupaten menikmati manfaat sepenuhnya, sementara desa dan masyarakat hanya berperan pasif tanpa dukungan yang memadai. Untuk menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kerja sama yang lebih transparan agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara adil.

Selain dari hasil wawancara diatas, peneliti juga menemukan data hasil observasi serta data dari dokumentasi. Peneliti telah mengamati bahwa dalam pengelolaan destinasi wisata pemandian air panas di Desa Mengeruda, pemerintah desa tidak dilibatkan sama sekali dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas ini . Tidak ada kerja sama yang dijalankan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam pengelolaan wisata ini. Seluruh aspek pengelolaan, mulai dari perekrutan tenaga kerja hingga pengelolaan pendapatan, sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada tanpa adanya peran dari pihak Desa Mengeruda, sedangkan Masyarakat lokal hanya memiliki keterlibatan yang sangat terbatas. Hanya beberapa orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan di area wisata, sementara beberapa lainnya hanya berjualan di luar area wisata tanpa memiliki izin dalam mengelola atau mengambil keputusan terkait Destinasi Wisata Pemandian Air Panas ini. Selain itu, belum ada regulasi yang mendukung keterlibatan masyarakat atau pemerintah desa dalam mengelola wisata. Hal ini juga tercermin dalam dokumen Peraturan Daerah (Perda) yang ada, di mana belum ditemukan regulasi yang secara khusus mengatur peran masyarakat desa maupun pemerintah desa dalam pengelolaan destinasi wisata

pemandian air panas tersebut. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, satu-satunya regulasi terkait adalah Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2032.



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TANGGAL 15 AGUSTUS 2017

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2017-2032

OBJEK DTW ALAM, DTW BUDAYA, DTW MINAT KHUSUS, DTW BUATAN
DAN LETAK OBJEK DTW

A. OBJEK DTW ALAM

1. Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau di Kecamatan Riung;
2. Pantai Watulajar di Kecamatan Riung;
3. Wisata Alam Sambinasi Torong Padang di Kecamatan Riung;
4. Air Terjun Rodang Puni di Kecamatan Riung Barat;
5. Air Terjun Dhamu di Kecamatan Riung Barat;
6. Pegunungan Wolomeze di Kecamatan Wolomeze;
7. Perkebunan Kemiri Sunan dan Perkebunan Rakyat di Kecamatan Wolomeze;
8. Air Panas Mengeruda di Kecamatan Soa;
9. Air Panas Mana di Kecamatan Golewa;
10. Perkebunan Cengkeh Malanusa di Kecamatan Golewa;
11. Air Terjun Betho Padhi di Kecamatan Golewa Barat;
12. Air Terjun Wae Pua di Kecamatan Golewa Selatan;
13. Pantai Pasir Putih (Ena Bhara) Roda dan Utaseko di Kecamatan Golewa Selatan;
14. Air Panas Boba di Kecamatan Golewa Selatan;
15. Pantai Ena Lewa di Kecamatan Aimere;
16. Kawah Gunung Inerie yang meliputi Kecamatan Bajawa, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie;
17. Pantai Pasir Putih (Ena Bhara) di Waebela Kecamatan Inerie;
18. Goa Alam Lialoga di Waebela Kecamatan Inerie;
19. Air Terjun Wae Ros di Kecamatan Jerebuu;
20. Air Panas Nage di Kecamatan Jerebuu;
21. Air Terjun Lekolodo di Kecamatan Bajawa;
22. Air Terjun Ogi di Kecamatan Bajawa;
23. Kawah Gunung dan Danau Vulkanik Wawomudha di Kecamatan Bajawa;
24. Perkebunan Kopi di Heiposo, Bomari dan Ubedolumolo Kecamatan Bajawa;
25. Hutan Alam Wolobobo di Kecamatan Bajawa; dan
26. Air Panas Boba di Kecamatan Bajawa Utara.

B. OBJEK DTW BUDAYA

1. Kampung Tua Lindi di Kecamatan Riung Barat;
2. Tradisi Berburu di Kecamatan Riung Barat;
3. Kampung Adat Libunio di Kecamatan Soa;
4. Lokasi Fosil Kawasan Matamenge dan Kawasan Cekungan di Kecamatan Soa;
5. Kampung Adat Wogo, Kampung Adat Doka dan Kampung Adat Mana di Kecamatan Golewa;
6. Kampung Adat Mangulewa dan Kampung Adat Be'a di Kecamatan Golewa Barat;

Dalam pengelolaan sektor pariwisata di daerah kabupaten ngada saat ini hanya terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2032 yang menjadi dasar hukum utama. Namun, Perda di atas belum secara spesifik mengatur mengenai mekanisme keterlibatan masyarakat lokal dan pemerintah desa, khususnya dalam konteks pengelolaan wisata pemandian air panas di Desa Mengeruda. Padahal, Kabupaten Ngada memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tidak hanya dari sisi kekayaan

alam yang melimpah, tetapi juga dari kekayaan budaya yang masih lestari dan menjadi daya tarik tersendiri. Kurangnya regulasi yang mengatur partisipasi aktif masyarakat lokal dapat menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pengelolaan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi serta kearifan lokal. Ketiadaan aturan yang eksplisit membuka peluang terjadinya dominasi pihak luar, dalam hal ini pemerintah kabupaten, dalam pengelolaan wisata tanpa melibatkan secara aktif masyarakat desa sebagai pemilik ruang hidup dan kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan atau regulasi khusus yang menempatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai subjek utama dalam pengembangan pariwisata, agar manfaat ekonomi dan sosial dari sektor ini dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh elemen masyarakat setempat.

Dari penjelasan tentang Bagaimana Hubungan Kuasa Pemerintah Kabupaten Ngada, Pemerintah Desa Mengeruda dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pemandian Air Panas di Desa Mengeruda yang ditemukan melalui hasil penelitian dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memandang bahwa hubungan kuasa dalam pengelolaan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda sepenuhnya didominasi oleh Pemerintah Kabupaten Ngada. Sementara itu, Pemerintah Desa Mengeruda dan masyarakat setempat hanya berperan sebagai penerima dampak tanpa memiliki kewenangan dalam proses pengelolaan atau pengambilan keputusan. Pemerintah kabupaten mengendalikan semua aspek pengelolaan wisata, termasuk kebijakan operasional dan pengelolaan tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah desa dan masyarakat hanya diberikan izin terbatas, seperti berdagang di luar kawasan wisata, tanpa ada keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan hubungan kuasa, dimana pihak lokal tidak memiliki cukup ruang untuk berperan aktif dalam mengelola aset wisata di daerahnya sendiri

Ketimpangan ini dijelaskan melalui teori relasi sebagai kekuasaan (dominasi) milik Michel Foucault. Dominasi merupakan salah satu bentuk kekuasaan asimetris, dimana pihak yang terdominasi hanya memiliki sedikit ruang untuk mempengaruhi kebijakan atau mengambil keputusan yang mempengaruhinya. Dalam pengelolaan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda, Pemerintah Kabupaten Ngada memegang kendali penuh, sedangkan Pemerintah Desa Mengeruda dan masyarakat berada dalam posisi subordinasi tanpa kewenangan yang signifikan dalam menentukan arah pengelolaan wisata. Dampak dari ketimpangan relasi kuasa ini sangat terlihat dalam distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah Desa Mengeruda dan masyarakatnya hanya memiliki akses yang terbatas tanpa kesempatan untuk berpartisipasi aktif atau memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih adil, sedangkan pemerintah kabupaten memegang kendali penuh terhadap pendapatan dan kebijakan pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas ini. Akibatnya, terjadi ketidakadilan struktural, di mana masyarakat setempat kehilangan peluang untuk mengoptimalkan potensi wisata sebagai sumber kesejahteraan ekonomi mereka sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan Relasi Kuasa Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas di Desa Mengeruda, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Berikut ini peneliti menarik kesimpulan tentang relasi kuasa pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan destinasi wisata di Desa Mengeruda masih menghadapi tantangan dalam aspek koordinasi dan kolaborasi antar level pemerintahan. Hubungan antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Desa Mengeruda sebagai sesama penyelenggara pemerintahan belum terjalin secara harmonis. Dalam praktiknya, pengelolaan destinasi wisata Mengeruda cenderung didominasi oleh Pemerintah Kabupaten, sementara Pemerintah Desa kurang dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program-program pengelolaan wisata. Ketidakterlibatan ini berdampak pada rendahnya rasa memiliki dari masyarakat lokal serta terbatasnya manfaat langsung yang dirasakan oleh desa.
2. Peran Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Mengeruda belum dijalankan secara proporsional. Fungsi sebagai regulator dan pelindung masyarakat belum berjalan seimbang. Pemerintah Kabupaten lebih menonjol dalam aspek pengendalian dan penguasaan terhadap objek wisata, sementara aspek perlindungan serta pemberdayaan masyarakat lokal masih kurang mendapat perhatian. Regulasi yang diberlakukan bersifat top-down dan

menekankan kewenangan sepihak, tanpa membuka ruang partisipasi yang adil bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

3. Hubungan timbal balik antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata ini belum berjalan secara optimal. Minimnya keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah desa mencerminkan bahwa pola hubungan antara ketiga pihak masih bersifat satu arah. Pemerintah Kabupaten memegang kendali penuh atas pengelolaan destinasi wisata dan menjadi pihak yang paling diuntungkan, baik dari sisi kewenangan maupun pendapatan. Sementara itu, masyarakat dan pemerintah desa cenderung hanya berperan sebagai pelengkap pasif yang tidak memiliki ruang partisipasi yang memadai serta tidak memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial yang sebanding.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka pada bagian ini penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Ngada memperkuat mekanisme koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Desa Mengeruda melalui pembentukan forum komunikasi rutin yang melibatkan kedua pihak serta perwakilan masyarakat. Selain itu, perlu diterapkan model pengelolaan kolaboratif (*collaborative management*) yang menempatkan desa sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program wisata. Pelibatan aktif desa tidak hanya akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat lokal, tetapi juga dapat mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan demi kemajuan pariwisata di Desa Mengeruda.
2. Sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih adil dan berkelanjutan, disarankan agar Pemerintah Kabupaten mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan destinasi wisata di Desa Mengeruda dengan

menyeimbangkan peran sebagai regulator dan pelindung masyarakat. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kabupaten juga perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat lokal agar mereka memiliki kapasitas dalam bidang pengelolaan wisata, kewirausahaan, dan pelayanan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dan desa, serta mendorong distribusi manfaat ekonomi dan sosial yang lebih merata.

3. Untuk mengatasi ketimpangan dalam hubungan timbal balik antar pemangku kepentingan, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Ngada membangun pola kemitraan yang lebih inklusif dan partisipatif dengan Pemerintah Desa Mengeruda serta masyarakat lokal melalui pembentukan lembaga pengelola bersama yang melibatkan perwakilan dari ketiga unsur tersebut. Lembaga ini dapat difungsikan sebagai wadah koordinasi, perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme musyawarah desa secara berkala yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten juga disarankan menyediakan pelatihan-pelatihan di bidang manajemen wisata, pelayanan, dan kewirausahaan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu berkontribusi secara aktif dan memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan wisata. Dengan cara ini, hubungan timbal balik yang lebih setara dan berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong Lexi, J.(2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Taylor, B. &. (1922). *Pengantar Metode Kualitatif suatu pendekatan fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosia*. Surabaya: Usaha Nasional Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: Afabeta
- Foucault, M. 1984. *The Foucault Reader*. Edited by Paul Rabinow. Pantheon Books.

Jurnal

- Armela Shintani, ‘Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong’, *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 9.2(2021) 28–37 <<https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1517>>.
- Afif, H., Nawawi, Z.M. (2022). ‘Pengaruh Relasi Dan Pola Komunikasi Bisnis Terhadap Penjualan Pada Percetakan Buku Cv. Merdeka Kreasi’, *Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 4.(1), 8.
- Anggraeni, D. F., & Fadlurrahman, M. P. A. (2018). ‘Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata’, *Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN)*, 2(1), 166–77
<<http://repository.ub.ac.id/6750/1/Pradipta%20JMAN>>
- Deki, (2019). "PARIWISATA AIR TERJUN BERAWAN DI KABUPATEN BENGKAYAN"
Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, 1–17.
- Eko, S. (2021). ‘Government Making: Rebuilding Government Science’, *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20
<<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>>.
- Fauziah, D. (2017) *Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015*. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 4(1) Februari 2017.
- Oramahi, S. J. K. S., Kamahi, S. B., & Baso, B. T (2024) ‘Relasi Kuasa Dalam Tata Kelola Objek Wisata. Pantai Sebanjar Studi Relasi Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Sebanjar” *Jurnal Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 2(4)
- Pendong, A., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2020) Frans Singkoh, and Fanley Pangemanan, ‘Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan’, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.(5), 1–11.

- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa & Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Suprpta, K. A. G., & Mahagangga, G. A. O. (2017) 'Relasi Antara Investor Pariwisata Dengan Masyarakat Lokal Di Desa Pakraman Laplapan Desa Petulu Kecamatan Ubud (Studi Kasus Konflik Sosial)', 5.(1), 51–55.
- Santoso,. R. (2017) 'Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Insfratraktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016', *Jom Fisip*, 4.(2), (2017), 1–12.
- Shintani, A. (2021) 'Relasi Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Di Kelurahan Sei Gohong', *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9.(2)28–37 <<https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1517>>.
- Sugiman, (2018). 'Pemerintah Desa', *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7.(1), 84–85.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R & Waworundeng, W. (2021). 'Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wi layah SungaiSulawesi)', *Jurnal Governance*, 1(2).1-10
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/3372>
- Sardi, I. (2017). Relasi Kuasa dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gemilang Cahaya Mentari. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2).
- Sjafirah, N.A., Sjuchro, D. W., & Budiana, H. R. (2020). Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Suntenjaya Sebagai Community Based Tourism, 8(1), *Journal of Tourism and Creativity P-* ISSN: 2549-483X E-ISSN: 2716- 5159.
- Taluke, D., dkk. (2019). 'Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat', *Spasial*, 6(2), 531–40.
- Widiastuti, R., & Makhasi, G.Y.M. (2019) 'Wacana Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul', *Jurnal Gama Societa*, 3.(2), 47–58.
- Wutoy, G. G. T., & Nugroho, T. (2020) 'Relasi Pemerintah Dan Masyarakat Kampung Dalam Pengembangan Kampung Wisata Berap, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Tahun 2022', *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3.(3), 124–36
<<https://doi.org/10.18196/jpk.v3i3.14891>>.
- Yusuf, R., Hedawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). 'Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–15
<<https://doi.org/10.38035/JMPIS>>.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetng Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Interview Guide (Panduan Wawancara)

Nama Informan :
Jabatan/Pekerjaan :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

- A. Relasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah
1. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan Pemerintah Desa Mengeruda dalam pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas?
 2. Bagaimana bentuk koordinasi dan komunikasi yang saat ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata Pemandian Air Panas Mengeruda?
 3. Bagaimana Pemerintah Kabupaten memberikan ruang bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata ini, dan sejauh mana Pemerintah Desa dapat berperan dalam pengembangan fasilitas tambahan?
 4. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, terutama terkait dengan sumber daya dan prosedur yang harus diikuti?
 5. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan keterlibatan dalam pengelolaan wisata, dan bagaimana respons dari Pemerintah Kabupaten terhadap inisiatif tersebut?

B. Relasi pemerintah sebagai regulating dan proteksi bagi masyarakat desa mengeruda.

1. Bagaimana kondisi pengelolaan Destinasi Wisata Pemandian Air Panas sebelum pemerintah kabupaten mengambil alih, dan bagaimana perbedaannya dengan sekarang?
2. Apakah ada regulasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Desa Mengeruda untuk terlibat dalam pengelolaan wisata ini? Jika tidak, bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
3. Sejauh mana pemerintah desa dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata ini?
4. Apa alasan pemerintah kabupaten mengambil alih pengelolaan wisata ini, dan bagaimana peran masyarakat serta pemerintah desa dalam regulasi yang ada saat ini?
5. Bagaimana kondisi para pedagang di sekitar kawasan wisata? Apakah ada regulasi, bantuan, atau fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah kabupaten?

C. Hubungan timbal balik antara pemerintah kabupaten pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata air panas mengeruda.

1. Bagaimana hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan wisata Air Panas Mengeruda?
2. Apakah desa mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan wisata ini?
3. Bagaimana hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan wisata ini?
4. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mengatur keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi dari destinasi wisata air panas Mengeruda

DOKUMENTASI



(Foto Pasca Wawancara dengan Kepala Desa Mengeruda, Bpk, Dominikus Oskar Gae pada Rabu, 08 januari 2025)



(Foto Pasca Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada, Bpk Oktavianus Botha Djawa pada Senin 20 Januari 2025)



(Foto Pasca Wawancara dengan Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada,
Bpk Theodosius Yosefus Nono pada Senin 20 Januari 2025)



(Foto Pasca Wawancara dengan Masyarakat Desa Mengeruda,
Bpk Yohanes Wilhelmus pada Rabu 15 Januari 2025)



(Foto Pasca Wawancara dengan Masyarakat yang Berjualan di Sekitaran Wisata, Ibu Theresia Deku, pada Jumat 17 Januari 2025)



(Foto Pasca Wawancara dengan Masyarakat yang Berjualan di Sekitaran Wisata, Ibu Marsiana Mau, pada Jumat 17 Januari 2025)